

Katalog BPS : 1103003



Data Strategis BPS



BADAN PUSAT STATISTIK

DATA STRATEGIS BPS

ISBN : 978-979-724-903-4

Katalog BPS : 1103003

Nomor Publikasi : 03200.0801

Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : 126+ vi

Naskah:

Direktorat Neraca Produksi

Direktorat Neraca Pengeluaran

Direktorat Statistik Harga

Direktorat Statistik Distribusi

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Penyunting:

Direktorat Diseminasi Statistik

Penata Letak:

Direktorat Diseminasi Statistik

Gambar Kulit Oleh:

Direktorat Diseminasi Statistik

Penerbit:

Badan Pusat Statistik

Dicetak Oleh:

Badan Pusat Statistik

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR



Pada era informasi saat ini, data telah menjadi kebutuhan pokok berbagai pihak. Tidak ada kegiatan perencanaan, pengendalian, maupun evaluasi tanpa menggunakan data.

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung-jawab atas perstatistikan di Indonesia. Oleh karena itu penyediaan data makro sebagai hasil dari kegiatan statistik merupakan tanggung jawab BPS sesuai tuntutan perundang-undangan.

Dari sekian banyak data yang disajikan BPS, terdapat beberapa data yang diseminasinya ditunggu berbagai pihak, di antaranya oleh pemerintah, akademisi, pebisnis, bahkan masyarakat umum. BPS menyebut data yang ditunggu tersebut sebagai Data Strategis yang terdiri atas pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor-impor, statistik kemiskinan, ketenagakerjaan, dan produksi pangan.

Dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun ke-63 Republik Indonesia, BPS mempersembahkan sebuah publikasi yang berjudul *Data Strategis BPS* kepada seluruh lapisan pengguna data sebagai sumbangsih BPS untuk kemajuan bangsa.

Karena spektrum pengguna sangat luas, maka setiap data pada buku ini diberi penjelasan praktis tanpa mengabaikan konsep/definisi baku yang disajikan pada bagian akhir buku dalam bentuk suplemen.

Sebuah upaya awal, walaupun merupakan yang terbaik dari lembaga ini, mungkin belum memenuhi harapan sebagian besar pengguna. Oleh karenanya, kritik dan saran penyempurnaan sangat diharapkan.

Semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2008
Kepala Badan Pusat Statistik,

Dr. Rusman Heriawan
NIP: 340003999

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Pendahuluan.....	1
Pertumbuhan Ekonomi.....	7
PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008: Semester I	10
Struktur PDB menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008; Semester I .	12
Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan Tahun 2004-2008: Semester I	13
Struktur PDB Menurut Penggunaan Tahun 2004-2008: SemesterI	15
PDB dan Produk Nasional Bruto (PNB) Per Kapita Tahun 2004-2007 ...	16
Angka Inflasi	17
Inflasi Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran	21
Statistik Ekspor Impor.....	25
Statistik Kemiskinan	37
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 1996–2008	40
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2007–Maret 2008	42
Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2007–Maret 2008	44
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	44
Data Kemiskinan Mikro Untuk Operasional Bantuan Langsung Tunai (BLT)	46
Penghitungan Kemiskinan oleh Bank Dunia	47
Perbandingan Angka Kemiskinan BPS dan Bank Dunia	48
Rangkuman	51
Statistik Ketenagakerjaan.....	53
Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Angka Pengangguran	56
Lapangan Pekerjaan Utama	59
Status Pekerjaan Utama	59
Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran Menurut Provinsi	61

Angka Produksi Padi dan Palawija	63
Angka Tetap Produksi Padi Tahun 2007	65
Angka Ramalan II Produksi Padi Tahun 2008	66
Pola Panen Padi Bulanan Tahun 2006-2008	67
Angka Tetap Produksi Jagung Tahun 2007	69
Angka Ramalan II Produksi Jagung Tahun 2008	70
Pola Panen Jagung Bulanan Tahun 2006--2008	71
Angka Tetap Tahun 2007	73
Angka Ramalan II Tahun 2008	73
Pola Panen Bulanan Tahun 2006–2008	74
Penjelasan Teknis Statistik	77
Produk Domestik Bruto (PDB)	79
Inflasi	89
Ekspor Impor Barang	95
Kemiskinan	98
Ketenagakerjaan	101
Angka Produksi Padi dan Palawija	107
Lampiran	113
Daftar Singkatan dan Akronim	123

PENDAHULUAN

<http://www.bps.go.id>

1

PENDAHULUAN

Buku ini berisi data strategis yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS), disertai penjelasan praktis. Kriteria strategis pada data yang dimaksud paling tidak mencakup pengertian tidak ada institusi lain yang menyusun data tersebut, banyak digunakan untuk berbagai kajian, menggambarkan fenomena dan bahkan mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi, dan kemunculannya dinantikan berbagai pihak.

Spektrum pengguna data strategis sangat lebar, mulai dari pemerintah, akademisi, pebisnis, kalangan internasional, hingga masyarakat umum. Lebarnya spektrum pengguna sejalan dengan sifat alamiah data yang memiliki dimensi yang sangat luas. Data dasar mulai dari jumlah penduduk, konsumsi per kapita, nilai tambah sektoral, dan berujung pada, misalnya Produk Domestik Bruto (PDB). Data harga dan perubahannya berujung pada angka inflasi. Data perekonomian internasional mencakup ekspor-impor dan data kepariwisataan. Data produksi primer di antaranya padi, jagung, dan hortikultura. Data kependudukan dan ketenagakerjaan mencakup aspek demografis lainnya, seperti tingkat kelahiran dan kematian maupun angka harapan hidup. Sesuai pengalaman empiris BPS, data strategis seperti kriteria yang telah disebutkan mencakup: pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor-impor, statistik kemiskinan, ketenagakerjaan, dan ramalan produksi padi dan palawija. Data strategis inilah yang akan disajikan dalam buku ini.

Agar buku ini bisa memenuhi harapan pengguna, pada setiap data yang disajikan diberi penjelasan praktis. Bagi yang ingin membaca penjelasan lebih rinci, dapat memperolehnya pada bagian penjelasan teknis statistik. Bagian ini memberikan informasi yang lengkap tetapi ringkas kepada pembaca tentang konsep definisi, metodologi, pengumpulan data, referensi, dan diseminasi data.

Data strategis yang dihasilkan BPS mencakup: pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor-impor, statistik kemiskinan, ketenagakerjaan, dan ramalan produksi padi dan palawija.

Pendahuluan

Karena penjelasan yang diberikan bersifat praktis, maka buku ini merupakan medium sosialisasi statistik produk BPS untuk pengambil kebijakan pada kalangan pemerintah, legislator, akademisi, peneliti, dan mahasiswa sebagai wujud untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik. Dengan semakin terpenuhinya kebutuhan masyarakat pengguna data, mereka selanjutnya diharapkan dengan penuh kesadaran, memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan perstatistikan BPS.

Setelah Bab Pendahuluan, pembaca dapat mencermati data terkini tentang PDB. Data ini menggambarkan kinerja ekonomi dari sisi besarnya, dan derivasi data ini dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi sektoral, tingkat peningkatan harga barang/jasa secara keseluruhan, dan masih ada kemungkinan lain tentang kegunaannya.

Pada Bab III pembaca dapat memanfaatkan data inflasi yang merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah, pelaku bisnis, kalangan perbankan, anggota parlemen, bahkan masyarakat umum berkepentingan terhadap data tersebut. Selanjutnya dalam Bab IV disajikan data statistik ekspor-impor untuk memberikan informasi mengenai kinerja perdagangan internasional, baik dari sisi volume maupun nilai. Pada bab ini juga disajikan rincian komoditi, negara asal dan tujuan, serta pelabuhannya.

Bab V mengantarkan pembaca untuk dapat mencermati data strategis tentang angka kemiskinan. Masalah tersebut merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi perhatian pemerintah negara manapun, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat. Ketersediaan data kemiskinan yang akurat merupakan aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangannya. Pada bab lainnya pembaca dapat mengikuti perkembangan data ketenagakerjaan dan kesejahteraan rakyat. Data dalam bab ini dapat menggambarkan kondisi sosial-ekonomi penduduk di suatu wilayah. Isu penting dalam ketenagakerjaan, di samping keadaan angkatan kerja dan strukturnya, adalah isu pengangguran.

Pendahuluan

Materi terakhir dari buku ini mengantarkan pembaca untuk mencermati penyajian angka ramalan produksi padi dan palawija. Data ini dapat digunakan untuk bahan perencanaan dan kebijakan yang terkait dengan ketahanan pangan nasional.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

PERTUMBUHAN EKONOMI

<http://www.bps.go.id>

2

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (value added) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah sama dengan pertumbuhan PDB. Apabila "diibaratkan" kue, PDB adalah besarnya kue tersebut. Pertumbuhan ekonomi sama dengan membesarnya "kue" tersebut yang pengukurannya merupakan persentase pertambahan PDB pada tahun tertentu terhadap PDB tahun sebelumnya.

PDB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan; dan penghitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan konsep harga konstan (constant prices) dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Saat ini BPS menggunakan tahun dasar 2000.

Nilai tambah juga merupakan balas jasa faktor produksi -tenaga kerja, tanah, modal, dan entrepreneurship-- yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDB hanya mempertimbangkan domestik, yang tidak mempedulikan kepemilikan faktor produksi.

Konsep dan definisi secara lebih lengkap disajikan dalam penjelasan teknis statistik. Berikut ini diuraikan data PDB dengan berbagai turunannya.

¹ Secara rumus pertumbuhan ekonomi adalah:

$$PE = \left(\frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \right) * 100\%$$

PE = pertumbuhan ekonomi;

t = tahun tertentu;

t-1 = tahun sebelumnya.

1. Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004–2008: Semester I

Ekonomi Indonesia selama tahun 2004–2007 mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 5,0 persen (2004), 5,7 persen (2005), 5,5 persen (2006), dan 6,3 persen (2007) dibanding tahun sebelumnya. Sementara pada semester I tahun 2008 bila dibandingkan dengan semester II tahun 2007 tumbuh sebesar 2,3 persen dan bila dibandingkan dengan semester I tahun 2007 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,4 persen. Angka-angka tersebut diperoleh dari penerapan rumus di atas ke dalam besaran PDB tahun 2004–2007 serta semester I tahun 2008 atas dasar harga konstan 2000 (Tabel 2.1 dan Tabel 2.2).

Sektor pengangkutan-komunikasi selama tahun 2004–2007 selalu mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 13,4 persen (2004), 12,8 persen (2005), 13,6 persen (2006), dan 14,4 persen (2007). Namun demikian pada sektor pengangkutan-komunikasi tersebut kontribusinya terhadap total pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 0,7 persen (2004), 0,8 persen (2005), 0,9 persen (2006), dan 1,0 persen (2007). Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2004 yaitu sektor industri pengolahan sebesar 1,8 persen, sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar 1,4 persen (2005), sektor industri pengolahan sebesar 1,3 persen (2006), dan sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar 1,4 persen (2007).

Pada semester I tahun 2008 ternyata sumber pertumbuhan terbesar juga terjadi pada sektor pengangkutan-komunikasi sebesar 1,4 persen dari total pertumbuhan yang sebesar 6,4 persen, sementara pada sektor industri pengolahan hanya memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 1,1 persen walaupun pertumbuhannya (y-on-y) sebesar 4,1 persen (Tabel 2.2).

Ekonomi Indonesia pada semester I tahun 2008 bila dibandingkan dengan semester II tahun 2007 tumbuh sebesar 2,3 persen dan bila dibandingkan dengan semester I tahun 2007 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,4 persen.

Tabel 2.1
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2004-2007 (Persentase)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan				Sumber Pertumbuhan			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	2,8	2,7	3,0	3,5	0,4	0,4	0,5	0,5
2. Pertambangan dan Penggalian	-4,5	3,2	2,2	2,0	-0,5	0,3	0,2	0,2
3. Industri Pengolahan	6,4	4,6	4,6	4,7	1,8	1,3	1,3	1,3
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	5,3	6,3	5,9	10,4	0,0	0,0	0,0	0,1
5. Konstruksi	7,5	7,5	9,0	8,6	0,4	0,4	0,5	0,5
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,7	8,3	6,1	8,5	0,9	1,4	1,1	1,4
7. Pengangkutan dan Komunikasi	13,4	12,8	13,6	14,4	0,7	0,8	0,9	1,0
8. Keuangan, Real estat dan Jasa Perusahaan	7,7	6,7	5,7	8,0	0,7	0,6	0,5	0,7
9. Jasa-jasa	5,4	5,2	6,2	6,6	0,5	0,5	0,6	0,6
PDB	5,0	5,7	5,5	6,3	5,0	5,7	5,5	6,3
PDB Tanpa Migas	6,0	6,6	6,1	6,9	-	-	-	-

Tabel 2.2
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha
Semester I Tahun 2008 (Persentase)

LAPANGAN USAHA	Semester I 2008 Terhadap Semester II 2007	Semester I 2008 Terhadap Semester I 2007	Sumber Pertumbuhan y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	5,5	5,3	0,7
2. Pertambangan dan Penggalian	-0,5	-1,4	-0,1
3. Industri Pengolahan	0,4	4,1	1,1
4. Listrik Gas dan Air Bersih	4,4	11,9	0,1
5. Konstruksi	1,0	8,0	0,5
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,4	7,5	1,3
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,5	20,0	1,4
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	4,2	8,5	0,8
9. Jasa-jasa	3,0	6,0	0,6
PDB	2,3	6,4	6,4
PDB TANPA MIGAS	2,6	6,8	-

PDB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2004 mencapai Rp1.656,5 triliun dan pada tahun 2007 meningkat menjadi sebesar Rp1.964,0 triliun. Sementara pada semester I tahun 2008 PDB atas dasar harga konstan sebesar

Angka Pertumbuhan Ekonomi

Rp1.024,2 triliun. Berdasarkan harga berlaku, tahun 2004 sebesar Rp2.295,8 triliun dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp3.957,4 triliun pada tahun 2007 sementara pada semester I tahun 2008 nilainya sebesar Rp2.353,0 triliun. (Tabel 2.3).

Tabel 2.3
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008: Semester I (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2000				
	2004	2005	2006	2007	Smt I 2008	2004	2005	2006	2007	Smt I 2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	329,1	364,2	433,2	547,2	345,3	247,2	253,9	262,4	271,6	143,1
2. Pertambangan dan Penggalian	205,3	309,0	366,5	440,8	267,7	160,1	165,2	168,0	171,4	84,9
3. Industri Pengolahan	644,3	760,4	919,5	1.068,8	640,1	470,0	491,6	514,1	538,1	275,1
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	23,7	26,7	30,4	34,8	19,6	10,9	11,6	12,3	13,5	7,3
5. Konstruksi	151,2	195,1	251,1	305,2	185,3	96,3	103,6	112,2	121,9	63,6
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	368,6	431,6	501,6	590,8	339,0	271,1	293,7	312,5	338,9	176,8
7. Pengangkutan dan Komunikasi	142,3	180,6	231,8	265,3	146,9	96,9	109,2	125,0	142,9	80,7
8. Keuangan, Real estat dan Jasa Perusahaan	194,4	230,5	269,1	305,2	174,1	151,1	161,2	170,1	183,7	97,6
9. Jasa-jasa	236,9	276,2	336,3	399,3	235,0	152,9	160,8	170,7	182,0	95,1
PDB	2.295,8	2.774,3	3.339,5	3.957,4	2.353,0	1.656,5	1.750,8	1.847,3	1.964,0	1.024,2
PDB Tanpa Migas	2.083,1	2.458,	2.967,3	3.541,0	2.091,8	1.506,3	1.605,3	1.703,6	1.821,4	953,2

2. Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008: Semester I

Distribusi PDB menurut sektor atau lapangan usaha atas dasar harga berlaku menunjukkan peran sektor-sektor ekonomi pada tahun tersebut. Tiga sektor utama: sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan mempunyai peran lebih dari separuh dari total perekonomian yaitu sebesar 58,5 persen pada tahun 2004, 56,1 persen (2005), 55,5 persen (2006) dan 55,7 persen (2007) serta 56,3 persen pada semester I tahun 2008. Pada tahun 2007 sektor industri pengolahan memberi kontribusi terhadap total perekonomian sebesar 27,0 persen, sektor

perdagangan-hotel-restoran 14,9 persen, dan sektor pertanian 13,8 persen; sementara pada semester I tahun 2008 urutan komposisinya berubah yaitu sektor industri pengolahan sebesar 27,2 persen, sektor pertanian 14,7 persen, dan sektor perdagangan-hotel-restoran 14,4 persen (Tabel 2.4).

Tabel 2.4
Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008: Semester I
(persentase)

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007	Smt I 2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	14,3	13,1	13,0	13,8	14,7
2. Pertambangan dan Penggalian	8,9	11,1	11,0	11,2	11,4
3. Industri Pengolahan	28,1	27,4	27,5	27,0	27,2
4. Listrik Gas dan Air Bersih	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8
5. Konstruksi	6,6	7,0	7,5	7,7	7,9
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,1	15,6	15,0	14,9	14,4
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,2	6,5	6,9	6,7	6,2
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	8,5	8,3	8,1	7,7	7,4
9. Jasa-jasa	10,3	10,0	10,1	10,1	10,0
PDB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
PDB TANPA MIGAS	90,7	88,6	88,9	89,5	88,9

3. Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan Tahun 2004-2008: Semester I

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2004 hingga semester I tahun 2008 selalu terjadi pertumbuhan positif di semua komponen PDB penggunaan, baik pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik serta ekspor maupun impor barang dan jasa.

Pada tahun 2007, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,0 persen, konsumsi pemerintah sebesar 3,9 persen, pembentukan modal tetap bruto sebesar 9,2 persen, serta ekspor maupun impor barang dan jasa, masing-masing sebesar 8,0 persen dan 8,9 persen (Tabel 2.5).

Tabel 2.5
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan Tahun 2004-2007
(Persentase)

Komponen Penggunaan	Laju Pertumbuhan				Sumber Pertumbuhan			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,0	4,0	3,2	5,0	3,0	2,4	1,9	2,9
2. Konsumsi Pemerintah	4,0	6,6	9,6	3,9	0,3	0,5	0,7	0,3
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,7	10,9	2,5	9,2	2,3	2,3	0,6	2,0
4. Ekspor	13,5	16,6	9,4	8,0	6,1	6,8	4,3	3,8
5. Dikurangi: Impor	26,6	17,8	8,6	8,9	7,2	5,8	3,1	3,3
Produk Domestik Bruto	5,0	5,7	5,5	6,3	5,0	5,7	5,5	6,3

Pertumbuhan ekonomi sampai dengan semester I tahun 2008 juga menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2008 terhadap semester I tahun 2007 (y-on-y) meningkat sebesar 6,4 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada komponen impor, ekspor dan pembentukan modal masing-masing sebesar 17,2 persen, 15,8 persen dan 14,1 persen. Sumber pertumbuhan terbesar semester I tahun 2008 berasal komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,5 persen (Tabel 2.6).

Tabel 2.6
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan Semester I
Tahun 2008 (Persentase)

JENIS PENGGUNAAN	Semester I 2008 Terhadap Semester II 2007	Semester I 2008 Terhadap Semester I 2007	Sumber Pertumbuhan y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,4	5,5	3,2
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-13,1	3,3	0,2
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3,6	14,1	3,1
4. Ekspor Barang dan Jasa	10,2	15,8	7,5
5. <u>Dikurangi</u> Impor Barang dan Jasa	7,0	17,2	6,4
PDB	2,3	6,4	6,4

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 sebesar Rp1.532,9 triliun meningkat menjadi Rp2.511,3 triliun (2007). Demikian pula atas dasar harga konstan, pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat dari Rp1.004,1

triliun (2004) menjadi sebesar Rp1.131,2 triliun (2007). Sementara besaran nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga pada semester I tahun 2008 atas dasar harga berlaku sebesar Rp1.446,6 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp584,8 triliun (Tabel 2.7).

Tabel 2.7
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2004-2008: Semester I (triliun rupiah)

Jenis Penggunaan	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2000				
	2004	2005	2006	2007	Smt I 2008	2004	2005	2006	2007	Smt I 2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.532,9	1.785,6	2.092,7	2.511,3	1.446,6	1.004,1	1.043,8	1.076,9	1.131,2	584,8
2. Konsumsi Pemerintah	191,1	225,0	288,1	329,8	182,0	126,2	134,6	147,6	153,3	71,8
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	515,4	655,9	805,5	983,8	608,2	354,9	393,5	403,2	440,1	238,9
4. a. Perubahan Inventori	36,9	340,0	42,4	0,2	4,9	25,1	33,5	29,0	0,9	2,5
b. Diskrepansi Statistik	-87,7	-47,2	-69,9	-27,2	65,8	8,8	-8,5	16,9	57,0	19,7
5. Ekspor	739,6	945,1	1.036,3	1.162,0	724,7	680,6	793,6	868,3	937,8	529,6
6. Dikurangi: Impor	632,4	830,1	855,6	1.002,5	679,2	643,2	639,7	694,6	756,3	423,1
Produk Domestik Bruto	2.295,8	2.774,3	3.339,5	3.957,4	2.353,0	1.656,5	1.750,8	1.847,3	1.964,0	1.024,2

4. Struktur PDB Menurut Penggunaan Tahun 2004-2008: Semester I

Dilihat dari distribusi PDB penggunaan, konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam penggunaan PDB Indonesia; yaitu sebesar 66,8 persen (2004), 64,4 persen (2005), 62,7 persen (2006) dan 63,5 persen (2007). Komponen penggunaan lainnya yang cukup berperan yaitu pembentukan modal tetap bruto dan ekspor barang dan jasa. Pada semester I tahun 2008 peranan pembentukan tetap bruto dan ekspor barang dan jasa meningkat lebih tinggi dibandingkan tahun 2007, yaitu berturut-turut dari 24,9 persen menjadi 25,9 persen, dan dari 29,4 persen menjadi 30,8 persen (Tabel 2.8).

Tabel 2.8
Struktur PDB Menurut Penggunaan Tahun 2004-2008: Semester I
(persentase)

Komponen Penggunaan	2004	2005	2006	2007	Smt I 2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	66,8	64,4	62,7	63,5	61,5
2. Konsumsi Pemerintah	8,3	8,1	8,6	8,3	7,7
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,4	23,6	24,1	24,9	25,9
4. a. Perubahan Inventori	1,6	1,4	1,3	0,0	0,2
b. Diskrepansi Statistik	-3,8	-1,7	-2,1	-0,8	2,8
5. Ekspor Barang dan Jasa	32,2	34,1	31,0	29,4	30,8
6. Dikurangi: Impor Barang dan Jasa	27,5	29,9	25,6	25,3	28,9
PDB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

5. PDB dan Produk Nasional Bruto (PNB) Per Kapita Tahun 2004-2007

PDB/PNB per kapita adalah PDB/PNB (atas dasar harga berlaku) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selama tahun 2004-2007 PDB per kapita terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2004 sebesar Rp10,6 juta (US\$1.186,2), tahun 2005 sebesar Rp12,7 juta (US\$1.317,6), tahun 2006 sebesar Rp15,0 juta (US\$1.662,6), dan tahun 2007 sebesar Rp17,6 juta (US\$1.946,1). Sementara itu, PNB per kapita juga terus meningkat selama tahun 2004-2007 dengan peningkatan berkisar 11,6 persen-19,3 persen setiap tahunnya. PNB per kapita pada tahun 2004 sebesar Rp10,1 juta (US\$1.131,8) meningkat menjadi Rp16,9 juta (US\$1.869,1) pada tahun 2007 (Tabel 2.9).

Tabel 2.9
PDB dan PNB Per Kapita Indonesia Tahun 2004-2007

URAIAN	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PDB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku				
• Nilai (juta rupiah)	10,6	12,7	15,0	17,6
• Indeks Peningkatan (persen)	12,5	19,5	18,6	17,0
• Nilai (US\$)	1.186,2	1.317,6	1.662,6	1.946,1
PNB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku				
• Nilai (juta rupiah)	10,1	12,1	14,4	16,9
• Indeks Peningkatan (persen)	11,6	19,1	19,3	17,3
• Nilai (US\$)	1.131,8	1.253,5	1.591,6	1.869,1

ANGKA INFLASI

3

INFLASI

Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga.

Makna inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. *Resultante* (rata-rata tertimbang) dari perubahan harga bermacam barang dan jasa tersebut, pada suatu selang waktu (bulanan) disebut inflasi (apabila naik) dan deflasi (apabila turun).

Secara umum, hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index (CPI)*. Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi. Inflasi/deflasi tersebut dapat dihitung menggunakan suatu rumus².

Tujuan penyusunan inflasi adalah untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Tujuan tersebut penting dicapai karena indikator tersebut dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap.

Pada tingkat korporasi angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/

² Rumus:

$$INF_t = \left(\frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \right) \times 100$$

INF = inflasi (atau deflasi) pada waktu (bulan atau tahun) t ;
IHK = Indeks Harga Konsumen.

Angka Inflasi

stabilitas moneter dan perekonomian. Secara spesifik kegunaan angka inflasi antara lain untuk:

- a. Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage-indexation*),
- b. Penyesuaian nilai kontrak (*contractual payment*),
- c. Eskalasi nilai proyek (*project escalation*),
- d. Penentuan target inflasi (*inflation targeting*),
- e. Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*budget indexation*),
- f. Sebagai pembagi PDB, PDRB (*GDP deflator*),
- g. Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*),
- h. Indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 66 kota³, pada bulan Juli 2008 terjadi inflasi 1,37 persen, atau terjadi kenaikan IHK dari 110,08 pada bulan Juni menjadi 111,59 pada bulan Juli 2008. Dengan menggunakan rumus tersebut, diperoleh inflasi Juli 2008 sebesar $(111,59 - 110,08)/110,08 \times 100 = 1,37$. Laju inflasi tahun kalender 2008 sebesar 8,85 persen (IHK Juli 2008 dibanding Desember 2007), sedangkan laju inflasi *year on year* (Juli 2008 terhadap Juli 2007) adalah 11,90 persen. Secara periodik, IHK dan inflasi dari bulan Januari 2005 sampai dengan Juli 2008 disajikan pada Tabel 3.1.

Laju inflasi tahun kalender (Januari–Juli) 2007 adalah sebesar 2,81 persen, sedangkan pada selang waktu yang sama tahun 2008 sebesar 8,85 persen (Tabel 3.2).

³ Sampai dengan Mei 2008, pemantauan dilaksanakan di 45 kota.

Tabel 3.1
Inflasi Nasional, 2005–2008
(2002=100)

Bulan	IHK				Inflasi			
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	118,53	138,72	147,41	158,26	1,43	1,36	1,04	1,77
Februari	118,33	139,53	148,32	159,29	-0,17	0,58	0,62	0,65
Maret	120,59	139,57	148,67	160,81	1,91	0,03	0,24	0,95
April	121,00	139,64	148,43	161,73	0,34	0,05	-0,16	0,57
Mei	121,25	140,16	148,58	164,01	0,21	0,37	0,10	1,41
Juni	121,86	140,79	148,92	110,08 ¹⁾	0,50	0,45	0,23	2,46 ¹⁾
Juli	122,81	141,42	149,99	111,59 ¹⁾	0,78	0,45	0,72	1,37 ¹⁾
Agustus	123,48	141,88	151,11		0,55	0,33	0,75	
September	124,33	142,42	152,32		0,69	0,38	0,80	
Oktober	135,15	143,65	153,53		8,70	0,86	0,79	
November	136,92	144,14	153,81		1,31	0,34	0,18	
Desember	136,86	145,89	155,50		-0,04	1,21	1,10	

¹⁾ Tahun dasar 2007 (2007=100)

Tabel 3.2
Perbandingan Inflasi Bulanan, Tahun kalender,
Year on Year, 2006–2008

Inflasi	2006	2007	2008 (2007=100)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Juli	0,45	0,72	1,37
2. Januari – Juli (Tahun Kalender)	3,33	2,81	8,85
3. Juli terhadap Juli (year on year) (tahun n) (tahun n-1)	15,15	6,06	11,90

Inflasi Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran

Barang dan jasa dalam IHK dikelompokkan menjadi tujuh dan inflasinya adalah: kelompok bahan makanan (1,85 persen), kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (1,07 persen), kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar.

Inflasi *year on year* (Juli 2008 terhadap Juli 2007) sebesar 11,90 persen. Secara rinci, IHK dan inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Inflasi Nasional Juli 2008 Menurut Kelompok Pengeluaran
(2007 = 100)

Kelompok Pengeluaran	IHK			Inflasi Bulan Juli 2008 *)	Laju Inflasi Tahun Kalender 2008 **)	Inflasi ke Tahun ***)
	Juli 2007	Desember 2007	Juli 2008			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U m u m	99,72	102,52	111,59	1,37	8,85	11,90
1 Bahan Makanan	98,91	105,46	118,59	1,85	12,45	19,90
2 Makanan Jadi, minuman, Rokok dan Tembakau	100,03	102,18	110,55	1,07	8,19	10,52
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar	100,02	101,89	109,97	1,80	7,93	9,95
4 Sandang	99,04	104,60	109,49	0,81	4,67	10,55
5 Kesehatan	100,17	101,08	106,95	0,71	5,81	6,77
6 Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	99,88	102,98	106,82	1,74	3,73	6,95
7 Transpor dan Komunikasi dan Jasa Keuangan	100,09	99,79	110,28	0,71	10,51	10,18

*) Persentase perubahan IHK bulan Juli 2008 terhadap IHK bulan sebelumnya.

**) Persentase perubahan IHK bulan Juli 2008 terhadap IHK bulan Desember 2007

***) Persentase perubahan IHK bulan Juli 2008 terhadap IHK bulan Juli 2007

Pada bulan Juli 2008 andil inflasi menurut kelompok pengeluaran adalah sebagai berikut: kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 0,41 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,15 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,45 persen, kelompok sandang 0,06 persen, kelompok kesehatan 0,03 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,13 persen; dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,14 persen (Tabel 3.4).

Tabel 3.4
Andil Inflasi Nasional Kelompok Pengeluaran Juli 2008 (persen)

Kelompok Pengeluaran	Andil Inflasi
(1)	(%) (2)
U M U M	1,37
1. Bahan Makanan	0,41
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	0,15
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	0,45
4. Sandang	0,06
5. Kesehatan	0,03
6. Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	0,13
7. Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	0,14

STATISTIK EKSPOR-IMPOR

4

<http://www.bps.go.id>

STATISTIK EKSPOR-IMPOR BARANG

BPS secara periodik menyajikan data statistik ekspor-impor barang (*tradable goods*), namun tidak mencakup ekspor dan impor jasa. Data tersebut disusun dengan memanfaatkan dokumen pemberitahuan ekspor/impor barang yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC). Data ini termasuk kategori data yang mempunyai tenggang waktu (*time lag*) yang cukup singkat antara pengumpulan dan diseminasinya, yaitu 2 (dua) bulan.

Pencatatan sejak Januari 2008 menggunakan sistem perdagangan umum (*general trade*) karena barang yang masuk Kawasan Berikat dicatat sebagai impor.

Data ekspor-impor disajikan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perdagangan luar negeri Indonesia. Data yang disajikan mencakup volume maupun nilai, termasuk data yang dirinci menurut komoditi (jenis barang dan kelompok barang), negara tujuan/asal negara, dan pelabuhan muat/bongkar barang.

Bagi pemerintah, statistik ekspor-impor berguna dalam merumuskan kebijakan dan memantau kinerja perekonomian. Di samping itu, statistik tersebut dipakai dalam penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Neraca Pembayaran (*Balance of Payment/BOP*). Bagi swasta dan akademisi, statistik tersebut dapat dipakai untuk berbagai analisis dalam penelitian ekonomi dan sosial.

Pencatatan data ekspor-impor dilakukan oleh BPS sesuai rekomendasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), United Nations Statistical Division (UNSD). Berdasarkan rekomendasi tersebut, BPS mengambil wilayah pabean (*the custom frontier*) sebagai wilayah statistik. Wilayah pabean ini dipilih karena sumber datanya berupa dokumen ekspor-impor yang harus melalui penyelesaian pabean (*customs declaration*). Metode pengumpulan data tersebut juga dilakukan oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara

Statistik ekspor-impor berguna dalam merumuskan kebijakan dan memantau kinerja perekonomian, penyusunan PDB, dan Neraca Pembayaran.

Statistik Ekspor-Impor

ASEAN, kecuali Kamboja yang pengumpulan datanya dilakukan langsung melalui survei ke perusahaan eksportir dan importir.

Sesuai dengan kepentingan dalam spektrum pengguna, data tersebut disajikan dalam berbagai bentuk.

- a. Impor menurut komoditi yang dikodifikasi dengan *Harmonized System (HS)* dengan digitasi dari 1, 2, sampai dengan 10 digit. Selain kodifikasi tersebut, digunakan *the System of International Trade Classification (SITC)* dengan digitasi dari 1, 2, dan 3 digit. Demikian juga disajikan data impor menurut Penggunaan Barang.
- b. Ekspor/Impor menurut negara tujuan/asal.
- c. Ekspor/Impor menurut pelabuhan muat/bongkar.
- d. Ekspor/Impor menurut komoditi dan negara tujuan/asal.
- e. Ekspor/Impor menurut komoditi dan pelabuhan muat/bongkar.
- f. Ekspor/Impor menurut negara tujuan/asal dan komoditi.
- g. Ekspor/Impor menurut provinsi dan komoditi.

Menurut status penyajian, data ekspor-impor bulanan dikategorikan menjadi tiga.

- a. Angka sangat sementara dirilis sekitar **satu bulan** setelah akhir bulan pencatatan dan diterbitkan setiap bulan. Contoh: data bulan Juli akan dirilis pada bulan September pada tahun yang sama.
- b. Angka sementara dirilis dalam waktu sekitar **dua bulan** setelah akhir bulan pencatatan. Data yang dicatat pada bulan Juli akan dirilis pada awal bulan Oktober tahun yang sama.
- c. Angka tetap disajikan **tiga bulan** setelah akhir bulan pencatatan.

Data ekspor-impor bulanan dikategorikan menjadi tiga: angka sangat sementara, angka sementara, dan angka tetap.

Sedangkan data ekspor-import tahunan dapat diperoleh dalam waktu **empat bulan** setelah akhir tahun pencatatan. Angka ekspor tahun 2007 dapat diperoleh pada bulan April 2008.

Di bawah ini disajikan data statistik ekspor-import pokok yang merupakan salah satu data strategis yang dirilis oleh BPS.

Tabel 4.1.a
Perkembangan Ekspor Indonesia, Januari-Juni 2008

Uraian	Nilai FOB (Juta US\$)				% Perubahan	% Perubahan	% Peran thd
	Mei 2008	Juni 2008	Jan-Jun 2007	Jan-Jun 2008	Juni 2008 thd Mei 2008	Jan-Jun 2008 thd 2007	total Jan-Jun 2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Ekspor	12 887,9	12 895,0	53 859,9	70 450,6	0,06	30,80	100,00
Migas	3 214,8	2 980,3	9 719,6	16 068,5	-7,29	65,32	22,81
Minyak Mentah	1 652,6	1 327,8	4 068,9	7 448,5	-19,65	83,06	10,57
Hasil Minyak	335,8	298,8	1 325,2	1 740,6	-11,02	31,35	2,47
Gas	1 226,4	1 353,7	4 325,5	6 879,4	10,38	59,04	9,76
Nonmigas	9 673,1	9 914,7	44 140,3	54 382,1	2,50	23,20	77,19

Pada Juni 2008 terjadi peningkatan nilai ekspor bila dibandingkan Mei 2008 sebesar 0,06 persen (Tabel 4.1.a). Peningkatan nilai ekspor tersebut terjadi karena naiknya ekspor barang-barang nonmigas sebesar 2,50 persen.

Total ekspor periode Januari--Juni 2008 mengalami kenaikan sebesar 30,80 persen.

Nilai ekspor secara total untuk periode Januari hingga Juni 2008 sebesar US\$70.450,6 juta yang terdiri dari ekspor migas US\$16.068,5 juta dan ekspor nonmigas US\$54.382,1 juta. Jika dibandingkan dengan periode Januari-Juni tahun 2007 maka terjadi kenaikan sebesar 30,80 persen untuk ekspor total. Ekspor migas secara kumulatif (Januari-Juni 2008) naik 65,32 persen, sementara ekspor nonmigas naik 23,20 persen.

Tabel 4.1.b
Perkembangan Impor Indonesia Tahun 2008**

Uraian	Nilai CIF (juta US\$)		Perubahan Juni 2008** thd Mei 2008*		Nilai CIF (juta US\$) Semester I 2008**	%Peran thd Total Impor Semester I 2008**
	Mei 2008*	Juni 2008**	(Juta US\$)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Impor Indonesia	11 657,7	12 022,8	365,1	3,13	65 054,7	100,00
Migas	3 267,5	3 585,1	317,6	9,72	16 698,7	25,67
• Minyak Mentah	977,2	1 010,1	32,9	3,37	5 568,4	8,56
• Hasil Minyak	2 269,9	2 563,7	293,8	12,94	11 089,8	17,05
• Gas	20,4	11,3	-9,1	-44,61	40,5	0,06
Nonmigas	8 390,2	8 437,7	47,5	0,57	48 356,0	74,33

Keterangan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 4.1.b dapat dikemukakan bahwa nilai impor Indonesia selama Juni 2008 mengalami kenaikan 3,13 persen dibanding impor Mei 2008, yaitu dari US\$11.657,7 juta menjadi US\$12.022,8 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan impor migas sebesar US\$317,6 juta (9,72 persen). Lebih lanjut kenaikan impor migas disebabkan oleh kenaikan impor hasil minyak sebesar US\$293,8 juta (12,94 persen).

Secara runtun, nilai ekspor-impor migas dan nonmigas dari Juni 2007 sampai dengan Juni 2008 ditampilkan berturut-turut pada Tabel 4.2.a dan Tabel 4.2.b. Data sampai dengan April 2008 merupakan angka tetap, sedangkan untuk bulan Mei 2008 adalah angka sementara, dan nilai bulan Juni 2008 merupakan angka sangat sementara.

Nilai impor Indonesia selama Juni 2008 mengalami kenaikan 3,13 persen dibanding impor Mei 2008.

Tabel 4.2.a
Perkembangan Nilai Ekspor Juni 2007–Juni 2008

Bulan	Nilai FOB (juta US\$)			Persentase Perubahan Terhadap Periode Sebelumnya		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2007						
Juni	1 826,8	7 730,4	9 557,2	1,94	-3,56	-2,56
Juli	1 826,4	8 213,3	10 039,8	-0,02	6,25	5,05
Agustus	1 855,3	7 740,3	9 595,6	1,58	-5,76	-4,42
September	2 078,2	7 437,5	9 515,7	12,01	-3,91	-0,83
Oktober	1 985,0	8 319,0	10 304,0	-4,48	11,85	8,28
November	2 107,0	7 737,0	9 844,0	6,15	-7,00	-4,46
Desember	2 517,0	8 425,0	10 942,0	19,46	8,89	11,15
Jan-Des	22 088,6	92 012,3	114 100,9	4,09	15,62	13,2
2008						
Januari	2 243,9	8 947,7	11 191,6	-10,85	6,20	2,28
Februari	2 381,1	8 164,4	10 545,5	6,11	-8,75	-5,77
Maret	2 767,2	9 241,7	12 008,9	16,22	13,20	13,88
Maret	2 481,2	8 440,5	10 921,7	-10,34	-8,67	-9,05
April	3 214,8	9 673,1	12 887,9	29,57	14,60	18,00
Mei*)	2 980,3	9 914,7	12 895,0	-7,29	2,50	0,06
Juni**)	2 107,0	7 737,0	9 844,0	6,15	-7,00	-4,46

Tabel 4.2.b
Perkembangan Nilai Impor Juni 2007–Juni 2008

Bulan	Nilai CIF (juta US\$)			Persentase Perubahan terhadap Periode Sebelumnya		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2007¹⁾						
Juni	1 651,3	4 363,5	6 014,8	-13,64	-3,96	-6,83
Juli	1 768,5	4 592,0	6 360,5	7,10	5,24	5,75
Agustus	1 840,4	5 076,4	6 916,8	4,07	10,55	8,75
September	2 277,6	4 513,5	6 791,1	23,76	-11,09	-1,82
Oktober	1 810,2	4 475,7	6 285,9	-20,52	-0,84	-7,44
November	2 413,5	5 122,8	7 536,3	33,33	14,46	19,89
Desember	2 387,3	4 417,7	6 805,0	-1,09	-13,76	-9,70
Jan-Des	21 879,6	52 523,1	74 402,7	15,38	-5,30	24,75
2008²⁾						
Januari	1 918,4	7 689,7	9 608,1	-	-	-
Februari	2 576,9	7 266,0	9 842,9	34,33	-5,51	2,44
Maret	2 499,8	7 776,8	10 276,6	-2,99	7,03	4,41
April	2 826,7	8 668,7	11 495,4	13,08	11,47	11,86
Mei*)	3 267,5	8 390,2	11 657,7	15,59	-3,21	1,41
Juni**)	3 585,1	8 437,7	12 022,8	9,72	0,57	3,13

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

1) Data impor di luar kawasan berikut 2) Impor di luar dan di dalam Kawasan Berikut

Statistik Ekspor-Import

Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Juni 2008 terhadap Mei 2008 terjadi pada lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) sebesar US\$153,6 juta sedangkan penurunan terbesar pada kertas/karton (HS 48) sebesar US\$45,9 juta.

Selama Januari-Juni 2008, ekspor dari 10 golongan barang (HS 2 digit) memberikan kontribusi 58,59 persen terhadap total ekspor nonmigas. Dari sisi pertumbuhan, ekspor 10 golongan barang tersebut meningkat 28,38 persen terhadap periode yang sama tahun 2007. Sementara itu, peranan ekspor nonmigas di luar 10 golongan barang pada Januari-Juni 2008 sebesar 41,41 persen. Secara rinci, nilai ekspor sepuluh golongan barang utama dapat dilihat pada Tabel 4.3.a.

Selama Januari-Juni 2008, ekspor 10 golongan barang meningkat 28,38 persen dibanding periode yang sama tahun 2007.

Tabel 4.3.a
Ekspor Nonmigas Sepuluh Golongan Barang Utama HS 2 Digit Januari–Juni 2008

Golongan Barang (HS)	Nilai FOB (juta US\$)				Perubahan Juni 2008 thd Mei 2008 (juta US\$)	% Peran thd Total Nonmigas Jan-Jun 2008
	Mei 2008	Juni 2008	Jan-Jun 2007	Jan-Jun 2008		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Lemak & minyak hewan/nabati (15)	1 908,7	2 062,3	3 868,6	9 161,5	153,6	16,85
2. Bahan bakar mineral (27)	802,4	825,1	3 266,4	4 460,4	22,7	8,20
3. Karet dan barang dari karet (40)	691,6	687,9	2 953,3	3 904,0	-3,7	7,18
4. Mesin/peralatan listrik (85)	687,3	662,5	3 622,8	3 838,3	-24,8	7,06
5. Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	401,7	427,3	2 201,0	2 383,4	25,6	4,38
6. Bijih, Kerak, dan Abu Logam (26)	379,2	382,4	3 196,2	2 146,3	3,2	3,95
7. Kertas/Karton (48)	373,9	328,0	1 582,8	1 974,5	-45,9	3,63
8. Pakaian jadi bukan rajutan (62)	302,1	301,1	1 703,0	1 725,7	-1,0	3,17
9. Barang-barang rajutan (61)	242,0	239,3	1 099,2	1 234,8	-2,7	2,27
10. Bahan kimia organik (29)	181,3	165,5	1 326,6	1 035,9	-15,8	1,90
Total 10 Golongan Barang	5 970,2	6 081,4	24 819,9	31 864,8	111,2	58,59
Lainnya	3 702,9	3 833,3	19 320,4	22 517,4	130,4	41,41
Total Ekspor Nonmigas	9 673,1	9 914,7	44 140,3	54 382,2	241,6	100,00

Tabel 4.3.b
Impor Nonmigas Sepuluh Golongan Barang Utama HS 2 Diji
Januari–Juni 2008

Golongan Barang (HS)	Nilai CIF (juta US\$)					% Peran thd Impor Nonmigas Semester I 2008**
	Mei 2008*	Juni 2008**	Perubah an Juni 2008** thd Mei'08*	Semester I 2007 ¹⁾	Semester I 2008**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Mesin/pesawat mekanik (84)	1 509,7	1 445,9	-63,8	4 196,1	8 657,9	17,91
2. Mesin dan peralatan listrik (85)	1 170,0	1 323,7	153,7	2 159,4	7 124,1	14,73
3. Besi dan baja (72)	799,9	768,6	-31,3	2 009,6	4 332,8	8,96
4. Kendaraan dan bagiannya (87)	411,0	520,0	109,0	1 062,5	2 919,4	6,04
5. Bahan kimia organik (29)	461,6	396,2	-65,4	1 873,7	2 622,8	5,42
6. Plastik dan barang dari plastik (39)	342,9	356,6	13,7	1 034,8	1 993,4	4,12
7. Barang dari besi dan baja (73)	282,7	271,1	-11,6	637,0	1 587,7	3,28
8. Sereal (10)	185,2	183,2	-2,0	956,2	1 224,1	2,53
9. Pupuk (31)	266,5	192,8	-73,7	320,6	1 078,2	2,23
10. Kapas (52)	209,8	184,9	-24,9	483,6	1 063,3	2,20
Total 10 Golongan Barang Utama	5 639,3	5 643,0	3,7	14 733,5	32 603,7	67,42
Barang Lainnya	2 750,9	2 794,7	43,8	9 591,6	15 752,3	32,58
Total Impor Nonmigas	8 390,2	8 437,7	47,5	24 325,1	48 356,0	100,00

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

1) Di luar kawasan berikat

Pada Juni 2008 dibanding Mei 2008, dari 10 golongan barang utama impor nonmigas, 3 golongan mengalami peningkatan, sisanya mengalami penurunan.

Dari sepuluh golongan barang utama impor nonmigas Indonesia, tiga golongan barang mengalami peningkatan pada Juni 2008 dibanding Mei 2008 yaitu *mesin dan peralatan listrik* sebesar US\$153,7 juta (13,14 persen), *kendaraan dan bagiannya* sebesar US\$109,0 juta (26,52 persen), dan *plastik dan barang dari plastik* sebesar US\$13,7 juta (4,00 persen). Sementara itu, tujuh golongan barang lainnya mengalami penurunan.

Dari tujuh golongan barang yang mengalami penurunan, tiga golongan barang menurun di atas US\$50,0 juta yaitu *pupuk* sebesar US\$73,7 juta (27,65 persen), *bahan kimia organik* sebesar US\$65,4 juta (14,17 persen), dan *mesin/pesawat mekanik* sebesar US\$63,8 juta (4,23 persen). Satu golongan barang menurun antara US\$25,0 juta sampai US\$50,0 juta yaitu *besi dan baja* sebesar US\$31,3 juta (3,91 persen). Sementara itu, tiga golongan lainnya menurun di bawah US\$25,0 juta yaitu *kapas* sebesar US\$24,9 juta (11,97 persen), *barang dari besi dan baja* sebesar US\$11,6 juta (4,10 persen), dan *sereal* sebesar US\$2,0 juta (1,08 persen) dapat dilihat pada Tabel 4.3.b.

Tabel 4.4.a
Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan
Januari–Juni 2008

Negara Asal	Nilai FOB (Juta US\$)				Perubahan Juni 2008 thd Mei 2008 (Juta US\$)	% Peran thd Total Nonmigas Jan-Jun 2008
	Mei 2008	Juni 2008	Jan-Jun 2007	Jan-Jun 2008		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASEAN	2 065,3	2 020,1	9 147,3	11 914,6	-45,2	21,91
1 Singapura	871,0	760,6	4 265,6	5 044,8	-110,4	9,28
2 Malaysia	549,6	550,4	2 011,9	3 158,9	0,8	5,81
3 Thailand	261,1	308,3	1 206,4	1 596,4	47,2	2,93
Asean Lainnya	383,6	400,8	1 663,4	2 114,5	17,2	3,89
UNI EROPA	1 478,3	1 453,7	6 478,4	7 717,2	-24,6	14,19
4 Jerman	242,6	218,6	1 099,7	1 257,0	-24,0	2,31
5 Perancis	90,9	74,3	409,6	479,1	-16,6	0,88
6 Inggris	127,4	138,8	706,1	750,4	11,4	1,38
Uni Eropa Lainnya	1 017,4	1 022,0	4 263,0	5 230,7	4,6	9,62
NEG. UTAMA LAINNYA	3 601,2	3 883,0	19 490,3	21 749,2	281,8	40,00
7 Cina	703,0	763,8	3 153,4	4 362,0	60,8	8,02
8 Jepang	1 064,3	1 000,6	6 998,5	6 441,2	-63,7	11,85
9 Amerika Serikat	1 110,2	1 187,6	5 408,3	6 314,5	77,4	11,61
10 Australia	134,8	174,3	971,2	880,4	39,5	1,62
11 Korea Selatan	368,5	488,3	1 813,7	2 419,5	119,8	4,45
12 Taiwan	220,4	268,4	1 145,2	1 331,6	48,0	2,45
Total 12 Negara Tujuan	5 743,8	5 934,0	29 189,6	34 035,8	190,2	62,59
Lainnya	3 929,3	3 980,7	14 950,7	20 346,4	51,4	37,41
Total Ekspor Nonmigas	9 673,1	9 914,7	44 140,3	54 382,2	241,6	100,00

Ekspor nonmigas Indonesia pada Juni 2008 ke Amerika Serikat, Jepang, dan China masing-masing mencapai US\$1.187,6 juta, US\$1.000,6 juta dan US\$763,8 juta, dengan peranan ketiganya mencapai 29,77 persen.

Peningkatan ekspor nonmigas Juni 2008 terjadi ke Korea Selatan sebesar US\$119,8 juta, diikuti Amerika Serikat sebesar US\$77,4 juta, Cina naik sebesar US\$60,8 juta, Taiwan sebesar US\$48,0 juta, Thailand sebesar US\$47,2 juta, Australia sebesar US\$39,5 juta, Inggris sebesar US\$11,4 juta dan Malaysia sebesar US\$0,8 juta. Sementara ekspor ke Singapura turun sebesar US\$110,4 juta, Jepang sebesar US\$63,7 juta, Jerman sebesar US\$24,0 juta, dan Perancis sebesar US\$16,6 juta. Sementara

Peningkatan ekspor nonmigas Juni 2008 terhadap Mei 2008 terbesar ke Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Cina.

ekspor ke Uni Eropa (27 negara) pada Juni 2008 mencapai US\$1.453,7 juta. Secara keseluruhan, total ekspor ke duabelas negara tujuan utama di atas naik 3,31 persen.

Selama periode Januari-Juni 2008, Jepang masih merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai US\$6.441,2 juta (11,85 persen), diikuti Amerika Serikat dengan nilai US\$6.314,5 juta (11,61 persen), dan Singapura dengan nilai US\$5.044,8 juta (9,28 persen).

Tabel 4.4.b
Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Asal Barang Utama
Januari–Juni 2008

Negara Asal	Nilai CIF (juta US\$)		% Peran thd Impor Nonmigas Juni 2008**	Nilai CIF (juta US\$)		% Peran thd Impor Nonmigas Semester I 2008**
	Mei 2008*	Juni 2008**		Semester I 2007 ¹⁾	Semester I 2008**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASEAN	1 989,7	1 892,8	22,43	5 394,7	11 464,7	23,71
1 Singapura	981,2	878,9	10,41	1 892,6	5 657,5	11,70
2 Thailand	532,1	558,8	6,62	1 955,4	3 155,2	6,52
3 Malaysia	365,5	319,5	3,79	1 006,8	1 965,7	4,07
Asean Lainnya	110,9	135,6	1,61	539,9	686,3	1,42
UNI EROPA	911,9	793,8	9,41	3 377,2	4 898,0	10,12
4 Jerman	275,3	233,4	2,76	909,7	1 525,6	3,15
5 Perancis	62,8	93,4	1,11	544,4	594,1	1,23
6 Inggris	84,9	64,9	0,77	302,7	421,4	0,87
Uni Eropa Lainnya	488,9	402,1	4,77	1 620,4	2 356,9	4,87
NEG. UTAMA LAINNYA	4 026,0	4 222,8	50,05	11 741,0	23 646,2	48,90
7 Jepang	1 050,5	1 249,7	14,81	2 979,2	7 060,1	14,60
8 Cina	1 207,0	1 314,2	15,58	3 626,6	7 050,4	14,58
9 Amerika Serikat	697,4	649,9	7,70	2 223,5	3 766,5	7,79
10 Korea Selatan	414,6	466,2	5,53	970,4	2 401,1	4,97
11 Australia	405,3	301,1	3,57	1 277,3	1 931,5	3,99
12 Taiwan	251,2	241,7	2,86	664,0	1 436,6	2,97
Total 12 Negara Utama	6 327,8	6 371,7	75,51	18 352,6	36 965,7	76,44
Negara Lainnya	2 062,4	2 066,0	24,49	5 972,5	11 390,3	23,56
Total Impor Nonmigas	8 390,2	8 437,7	100,00	24 325,1	48 356,0	100,00

Keterangan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
¹⁾ Di Luar Kawasan Berikat

Statistik Ekspor-Import

Dari total nilai impor nonmigas Indonesia Juni 2008 sebesar US\$8.437,7 juta, sebesar US\$1.892,8 juta (22,43 persen) berasal dari ASEAN, dan sebesar US\$793,8 (9,41 persen) dari Uni Eropa. Berdasarkan negara asal barang utama, impor nonmigas dari Cina merupakan yang terbesar yaitu sebesar US\$1.314,2 juta atau 15,58 persen dari keseluruhan impor nonmigas Indonesia, diikuti Jepang sebesar US\$1.249,7 juta (14,81 persen), Singapura US\$878,9 juta (10,41 persen), Amerika Serikat US\$649,9 juta (7,70 persen), Thailand sebesar US\$558,8 juta (6,62 persen), Korea Selatan sebesar US\$466,2 juta (5,53 persen), Australia sebesar US\$301,1 juta (3,57 persen), Malaysia US\$319,5 juta (3,79 persen), Jerman sebesar US\$233,4 juta (2,76 persen), Taiwan sebesar US\$241,7 juta (2,86 persen). Selanjutnya impor nonmigas dari Perancis sebesar US\$93,4 juta (1,11 persen) dan Inggris sebesar US\$64,9 juta (0,77 persen). Secara keseluruhan, keduabelas negara utama di atas memberikan peran sebesar 75,51 persen dari total impor nonmigas Indonesia.

Sementara itu, dari total nilai impor nonmigas Indonesia selama semester I 2008 sebesar US\$48.356,0 juta, 76,44 persen berasal dari duabelas negara utama yaitu Jepang sebesar US\$7.060,1 juta atau 14,60 persen, diikuti oleh Cina sebesar US\$7.050,4 juta (14,58 persen). Berikutnya Singapura berperan 11,70 persen, Amerika Serikat 7,79 persen, Thailand 6,52 persen, Korea Selatan 4,97 persen, Malaysia 4,07 persen, Australia 3,99 persen, Jerman 3,15 persen, Taiwan 2,97 persen, Perancis 1,23 persen, dan Inggris 0,87 persen. Impor Indonesia dari ASEAN mencapai 23,71 persen dan dari Uni Eropa 10,12 persen.

Total nilai impor nonmigas Indonesia Juni 2008 berasal ASEAN (22,43 persen), Uni Eropa (9,41 persen).

STATISTIK KEMISKINAN

5

KEMISKINAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antarwaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. **Pengukuran kemiskinan** yang terpercaya (*reliable*) dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti: Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun nonmakanan yang bersifat mendasar. Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari; sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan

Penduduk miskin dapat juga dihitung melalui pendekatan lain, seperti yang dilakukan oleh Bank Dunia yang menghitung

jumlah penduduk miskin berdasarkan pengeluaran perkapita setara dengan US\$1 dan US\$2 PPP (*Purchasing Power Parity*/paritas daya beli).

BPS melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pertama kali pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret. Sebagai informasi tambahan, digunakan pula hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) yang dipakai untuk memperkirakan proporsi pengeluaran masing-masing komoditi pokok nonmakanan. Di samping data kemiskinan yang dihitung dari data Susenas (data kemiskinan makro), BPS juga mengeluarkan data rumah tangga sasaran (RTS) berdasarkan hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) untuk keperluan bantuan langsung tunai (BLT), yang juga disebut sebagai data kemiskinan mikro.

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 1996–2008

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996–2008 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000–2005 (Tabel 5.1). Pada periode 1996–1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Sementara itu, persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.

Pada periode 1999–2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta, yaitu dari 47,97 juta pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta pada tahun 2002. Secara relatif

Pada periode 1996–1999 jumlah penduduk miskin meningkat, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999 dan menurun menjadi 38,40 juta pada tahun 2002.

Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta kemudian meningkat menjadi 39,30 juta pada tahun 2006.

juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 18,20 persen pada tahun 2002.

Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002–2005 sebesar 3,3 juta, yaitu dari 38,40 juta pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 18,20 persen pada tahun 2002 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. Akan tetapi pada periode 2005–2006 terjadi pertambahan jumlah penduduk miskin sebesar 4,20 juta, yaitu dari 35,10 juta pada tahun 2005 menjadi 39,30 juta pada tahun 2006. Akibatnya persentase penduduk miskin juga meningkat dari 15,97 persen menjadi 17,75 persen.

Tabel 5.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Daerah, 1996–2008

Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42

Pada Maret 2007 jumlah penduduk miskin 37,17 juta orang.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta (16,58 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2006 yang berjumlah 39,30 juta (17,75 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin pada Maret 2007 masih lebih tinggi dibandingkan

keadaan Februari 2005, di mana persentase penduduk miskin sebesar 15,97 persen. Pada bulan Maret 2008, jumlah penduduk miskin menurun kembali menjadi 34,96 juta (15,42 persen) atau turun sebesar 2,21 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2007–Maret 2008

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta (16,58 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta.

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2007–Maret 2008, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,42 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,79 juta orang (Tabel 5.2).

Persentase penduduk miskin daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2007, sebagian besar (63,52 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sementara pada bulan Maret 2008 persentase ini hampir sama yaitu 63,47 persen.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang, sebagian besar (63,52 persen) berada di daerah perdesaan.

Tabel 5.2
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2007–Maret 2008

Diolah dari data Susenas Panel Maret 2007 dan Maret 2008

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah Penduduk Miskin (juta)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Perkotaan</u>					
Maret 2007	132 259	55 683	187 942	13,56	12,52
Maret 2008	143 897	60 999	204 896	12,77	11,65
<u>Perdesaan</u>					
Maret 2007	116 265	30 572	146 837	23,61	20,37
Maret 2008	127 207	34 624	161 831	22,19	18,93
<u>Kota+Desa</u>					
Maret 2007	123 993	42 704	166 697	37,17	16,58
Maret 2008	135 270	47 366	182 636	34,96	15,42

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2007–Maret 2008. Faktor-faktor tersebut antara lain:

Pertama, inflasi umum relatif stabil selama periode Juli 2007–Juli 2008. Laju inflasi umum “year-on-year” (Juli 2008 terhadap Juli 2007) sebesar 11,90 persen⁴.

Kedua, komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Rata-rata harga beras nasional selama periode Juni 2007–Juni 2008 naik 7,68 persen, yaitu dari Rp5.949 per kg pada Juni 2007 menjadi Rp6.406 per kg pada Juni 2008. Kenaikan harga beras ini berbanding lurus dengan inflasi *year-on-year* periode yang sama sebesar 11,90 persen.

Ketiga, sekitar 70 persen penduduk miskin di daerah perdesaan bekerja di sektor pertanian. Tingkat upah pekerja di sektor pertanian pada bulan Maret 2008 menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik. Secara nasional, rata-rata upah nominal harian buruh tani selama periode bulan Maret 2007–Maret 2008 meningkat 9,88 persen, naik dari Rp14.932 pada Maret 2007 menjadi Rp16.407 pada Maret 2008. Pada periode yang sama, rata-rata upah riil harian buruh tani juga mengalami kenaikan 0,90 persen, yaitu dari Rp2.553 pada Maret 2007 menjadi Rp2.576 pada Maret 2008. Artinya, daya beli buruh tani relatif sedikit membaik. Selama *subround I* (Januari–April) 2008 juga terjadi panen raya. Produksi padi *subround I*-2008 naik 5,55 juta ton (sekitar 24,86 persen) dari produksi padi *Subround I*-2007, yaitu dari 22,31 juta ton GKG pada *subround I*-2007 menjadi 27,86 juta ton GKG pada *subround I*-2008 (hasil Angka Ramalan II 2008), lihat Tabel 7.2.

Keempat, selama periode Februari 2007–Februari 2008 jumlah penganggur berkurang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2007 sebesar 9,75 persen (10,55 juta orang), turun menjadi 8,46 persen (9,43 juta) pada Februari 2008. Turunnya pengangguran ini terjadi karena terbukanya lapangan kerja di sektor informal sehingga membuka kemungkinan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin (Tabel 6.1).

Faktor yang dapat mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin periode Maret 2007–Maret 2008: inflasi umum relatif stabil, harga beras nasional naik, tingkat upah pekerja di sektor pertanian relatif lebih baik, turunnya pengangguran terutama di sektor informal.

⁴ BRS No.39/08/Th. XI, 1 Agustus 2008, *Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi*

3. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2007–Maret 2008

Selama Maret 2007–Maret 2008, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,56 persen, yaitu dari Rp166.697 per kapita per bulan pada Maret 2007 menjadi Rp182.636 per kapita per bulan pada Maret 2008 (Tabel 5.2). Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi nonmakanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2007, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 74,38 persen dan pada bulan Maret 2008, peranannya hampir sama yaitu 74,07 persen.

Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2008, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan sebesar 38,97 persen di perdesaan dan 28,06 persen di perkotaan. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan adalah gula pasir (4,18 persen di perdesaan, 3,10 persen di perkotaan), mie instan (2,82 persen di perdesaan, 3,39 persen di perkotaan), telur (2,43 persen di perdesaan, 3,38 persen di perkotaan), tempe (2,14 persen di perdesaan, 2,56 persen di perkotaan) dan tahu (1,65 persen di perdesaan, 2,27 persen di perkotaan).

Untuk komoditi nonmakanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan yaitu 5,28 persen di perdesaan dan 7,38 persen di perkotaan. Biaya untuk listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk daerah perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 3,07 persen, 2,72 persen dan 2,65 persen, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (masing-masing kurang dari 2,00 persen).

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu

Selama Maret 2007–Maret 2008, Garis Kemiskinan naik dari Rp166.697 per kapita per bulan menjadi Rp182.636 per kapita per bulan.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan

diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Pada periode Maret 2007–Maret 2008, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,99 pada keadaan Maret 2007 menjadi 2,77 pada keadaan Maret 2008. Demikian pula Indeks Keparahannya Kemiskinan turun dari 0,84 menjadi 0,76 pada periode yang sama (Tabel 5.3). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Tabel 5.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2007–Maret 2008

Diolah dari data Susenas Panel Maret 2007 dan Maret 2008

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)</u>			
Maret 2007	2,15	3,78	2,99
Maret 2008	2,07	3,42	2,77
<u>Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2)</u>			
Maret 2007	0,57	1,09	0,84
Maret 2008	0,56	0,95	0,76

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada bulan Maret 2008, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk perkotaan hanya 2,07

sementara di daerah perdesaan mencapai 3,42. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) untuk perkotaan hanya 0,56 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,95. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

5. Data Kemiskinan Mikro Untuk Operasional Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Data kemiskinan hasil Susenas merupakan data kemiskinan yang bersifat makro (agregasi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Data ini hanya menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi, tetapi tidak dapat menunjukkan *siapa si miskin* dan *di mana alamat mereka*, sehingga tidak operasional di lapangan. Untuk target sasaran keluarga/rumah tangga secara langsung sangat diperlukan data anggota keluarga/rumah tangga miskin dan lokasi tempat tinggal mereka. Upaya penyediaan data kemiskinan mikro ini dilakukan BPS dengan melaksanakan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) yang pada dasarnya adalah pendataan keluarga/RTS untuk penyaluran dana BLT tahun 2005/2006.

Hasil PSE05 adalah direktori RTS yang memuat informasi nama kepala rumah tangga dan lokasi tempat tinggalnya. RTS hasil PSE05 ini mencakup (dikelompokkan ke dalam) tiga kategori, yaitu sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin. Berbeda dengan metode penghitungan kemiskinan makro yang menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), penentuan RTS PSE05 didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga/ ciri-ciri rumah tangga miskin.

Ada 14 variabel/karakteristik rumah tangga yang dipakai untuk menghitung Indeks Skor RTS. Keempat belas variabel tersebut adalah luas lantai perkapita, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, bahan bakar, membeli daging/ayam/susu, frekuensi makan, membeli pakaian baru, kemampuan berobat, lapangan

Data Kemiskinan untuk operasional bantuan langsung tunai (BLT) didapat dari PSE 05 yang mencakup rumah tangga sasaran kategori: sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin.

usaha kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, dan aset yang dimiliki rumah tangga.

Angka kemiskinan makro yang dihitung dari Susenas secara statistik seharusnya terbanding dengan data RTS kategori miskin dan sangat miskin hasil PSE05. Dari perbandingan kedua set data tersebut dengan menggunakan model regresi logistik diperoleh hasil dengan tingkat kesesuaian (*concordant*) berkisar antara 80–90 persen. Hal ini berarti ada ketidaksesuaian antara data kemiskinan mikro PSE05 dan data kemiskinan makro Susenas yang berkisar antara 10–20 persen. Jumlah rumah tangga miskin dan sangat miskin hasil PSE05 sekitar 12,2 juta. Jika diasumsikan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 4 orang dan dikombinasikan dengan angka koreksi 10–20 persen, maka jumlah penduduk miskin dan sangat miskin hasil PSE05 diperkirakan antara 39,04 juta dan 43,92 juta.

Dibandingkan dengan angka kemiskinan makro di Indonesia pada Maret 2006 sebesar 39,30 juta mengindikasikan adanya konsistensi antara hasil PSE05 dan penghitungan dari Susenas. Akan tetapi perlu kehati-hatian dalam membandingkan kedua data tersebut karena metode penghitungannya didasarkan pada pendekatan yang berbeda.

Data PSE05 akan di-*update* melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 mulai bulan September 2008 dalam rangka penyiapan database RTS untuk memenuhi kebutuhan data berbagai program perlindungan mulai tahun 2009.

Bank Dunia menghitung garis kemiskinan dengan menggunakan estimasi konsumsi yang dikonversi ke dalam US\$PPP (Purchasing Power Parity/paritas daya beli), bukan nilai tukar US\$ resmi.

6. Penghitungan Kemiskinan oleh Bank Dunia

Untuk membandingkan angka kemiskinan antarnegara, Bank Dunia menghitung garis kemiskinan dengan menggunakan estimasi konsumsi yang dikonversi ke dalam US\$PPP (*Purchasing Power Parity*/paritas daya beli), bukan nilai tukar US\$ resmi.

Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa di mana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli seharga US\$1 di Amerika. Angka konversi ini dihitung berdasarkan harga dan kuantitas di masing-masing negara yang

Statistik Kemiskinan

dikumpulkan dalam suatu survei yang biasanya dilakukan setiap lima tahun sekali.

Chen dan Ravallion (2001) membuat suatu penyesuaian angka kemiskinan dunia dengan menggunakan garis kemiskinan US\$1 PPP per orang per hari. Berdasarkan penghitungan yang mereka lakukan, pada tahun 1993 garis kemiskinan US\$1 PPP per hari adalah ekuivalen dengan Rp20.811 per bulan. Garis kemiskinan PPP disesuaikan dari waktu ke waktu dengan angka inflasi yang menggunakan Indeks Harga Konsumen. Pada tahun 2006 garis kemiskinan US\$1 PPP ekuivalen dengan Rp97.218 per orang per bulan dan garis kemiskinan US\$2 PPP ekuivalen dengan Rp194.439 per orang per bulan.

Pada tahun 2006 garis kemiskinan US\$1 PPP ekuivalen dengan Rp97.218 per orang per bulan dan garis kemiskinan US\$2 PPP ekuivalen dengan Rp194.439 per orang per bulan.

Perbandingan garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2006 menurut BPS dan Bank Dunia adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 2006

Sumber	Garis Kemiskinan per Hari	Garis Kemiskinan per Bulan	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
BPS	Rp5.066,57 US\$1.55 PPP	Rp151.997	17,8
Bank Dunia	US\$1 PPP Rp3.240,60	Rp97.218	7,4
	US\$2 PPP Rp6.481,30	Rp194.439	49,0

Sumber: *Making the New Indonesia Work for the Poor*, the World Bank (2006) dan BPS

7. Perbandingan Angka Kemiskinan BPS dan Bank Dunia

Bank Dunia memprediksi jumlah penduduk Indonesia berpendapatan di bawah US\$2 PPP per orang per hari pada tahun 2008 akan turun 4,6 juta orang dari 105,3 juta orang (45,2 persen) menjadi 100,7 juta orang (42,6 persen). Perhitungan itu dilakukan dengan menggunakan jumlah penduduk 232,9 juta orang pada tahun 2007 dan 236,4 juta orang pada tahun 2008.

Perkiraan tersebut dibuat dengan memperhitungkan laju inflasi sekitar 6 persen, dampak kenaikan harga minyak dunia saat ini (sekitar US\$94 per barel), dan tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan sebesar 6,4 persen.

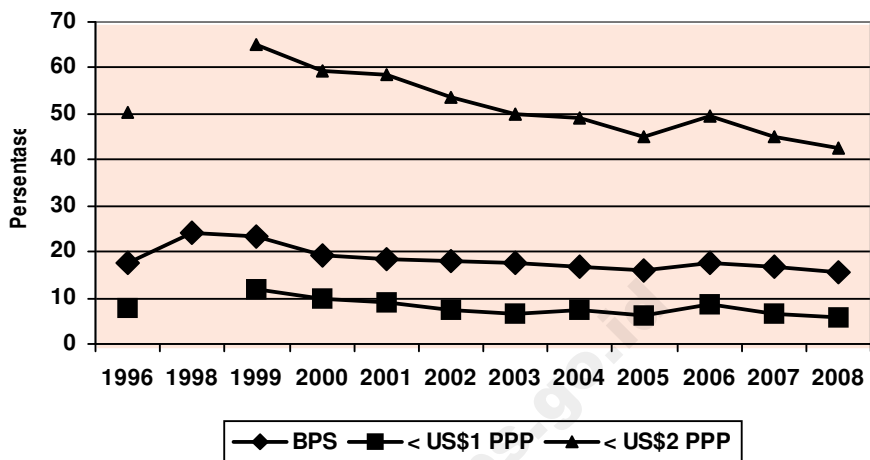
Berikut perbandingan jumlah dan persentase penduduk miskin berdasarkan perhitungan BPS dan Bank Dunia (lihat juga Gambar 5.1 dan 5.2).

Tabel 5.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Perhitungan BPS dan Bank Dunia, 1996–2008

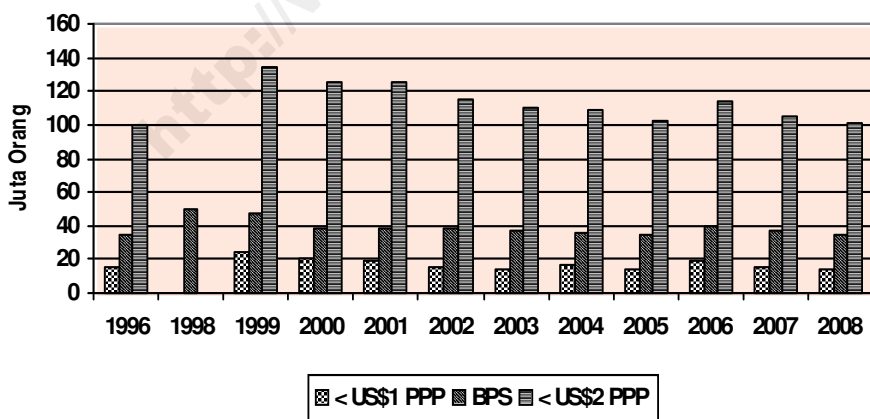
Tahun	BPS		Bank Dunia			
	Penduduk Miskin		Penduduk Miskin di Bawah US\$1 PPP		Penduduk Miskin di Bawah US\$2 PPP	
	Jumlah (juta)	Persentase	Jumlah (juta)	Persentase	Jumlah (juta)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1996	34,01	17,47	15,40	7,80	99,60	50,50
1998	49,50	24,23	-	-	-	-
1999	47,97	23,43	24,90	12,00	135,00	65,10
2000	38,70	19,14	20,90	9,90	125,30	59,50
2001	37,90	18,41	19,70	9,20	125,20	58,70
2002	38,40	18,20	15,50	7,20	115,60	53,50
2003	37,30	17,42	14,50	6,60	110,00	50,10
2004	36,10	16,66	16,50	7,40	109,10	49,00
2005	35,10	15,97	13,60	6,00	102,10	45,20
2006	39,30	17,75	19,50	8,50	113,80	49,60
2007	37,17	16,58	15,50	6,70	105,30	45,20
2008	34,96	15,42	14,00	5,90	100,70	42,60

Selain Indonesia, banyak negara yang juga mengeluarkan data kemiskinan versi negara masing-masing. Pada Gambar 5.3 disajikan contoh perbandingan data kemiskinan resmi yang dikeluarkan pemerintah dan data kemiskinan versi Bank Dunia. Terlihat bahwa tingkat (persentase) kemiskinan yang resmi yang dikeluarkan suatu negara pada umumnya terletak di antara dua versi data yang dikeluarkan Bank Dunia. Untuk Cina dan India data resmi kemiskinannya lebih rendah dari data kemiskinan Bank Dunia untuk kriteria US\$ 1 PPP.

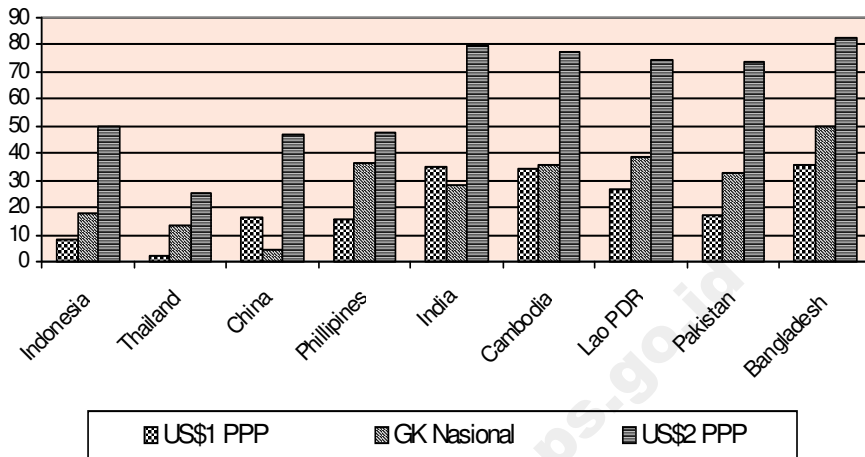
Gambar 5.1
 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Perhitungan
 BPS dan Bank Dunia, 1996–2008



Gambar 5.2
 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Perhitungan
 BPS dan Bank Dunia, 1996–2008



Gambar 5.3
Persentase Penduduk Miskin di Beberapa Negara
Menurut Garis Kemiskinan Nasional dan Kriteria Bank Dunia 1996



Sumber: Human Development Report 2006, UNDP

8. Rangkuman

BPS melakukan perhitungan jumlah penduduk miskin secara konsisten sejak tahun 1984 hingga kini berdasarkan kebutuhan dasar minimal yang harus dipenuhi seseorang, baik untuk makanan maupun nonmakanan.

BPS melakukan perhitungan jumlah penduduk miskin berdasarkan kebutuhan dasar minimal yang harus dipenuhi seseorang, baik untuk makanan maupun nonmakanan, dan itu dilakukan secara konsisten sejak tahun 1984 hingga kini.

Bank Dunia melakukan perhitungan jumlah penduduk miskin berdasarkan pengeluaran per kapita setara dengan US\$1 dan US\$2 PPP (*Purchasing Power Parity*), dengan tujuan untuk memperoleh keterbandingan tingkat kemiskinan antar negara. Nilai pengeluaran US\$1 per kapita per hari berada di bawah garis kemiskinan yang dihitung BPS, sebaliknya nilai pengeluaran US\$2 per kapita perhari berada di atas garis kemiskinan BPS, artinya lebih besar dari kebutuhan dasar minimal.

Untuk melihat apakah jumlah penduduk miskin cenderung meningkat atau menurun, harus menggunakan seri data dari sumber yang sama (konsisten). Tidak akan ada maknanya bila satu tahun tertentu menggunakan data BPS, tetapi tahun lainnya menggunakan data dari Bank Dunia, atau sebaliknya.

STATISTIK KEPENDAGANGAN

<http://www.bps.go.id>

6

KETENAGAKERJAAN

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan, adalah isu pengangguran. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Data tentang ketenagakerjaan dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu.

Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu.

Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan pengumpulan dan penyajian data kependudukan dan ketenagakerjaan melalui berbagai kegiatan sensus dan survey, antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sakernas merupakan survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan dengan pendekatan rumah tangga.

Sakernas dilaksanakan sejak tahun 1976, namun mulai tahun 1986 dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali (triwulanan). Sampai saat ini, Sakernas telah mengalami berbagai perubahan terutama dalam periode pencacahan, metodologi, maupun cakupan sampel wilayah rumah tangga. Tahun 1994 sampai dengan 2001 Sakernas dilaksanakan secara tahunan, yaitu pada setiap bulan Agustus, kecuali pada tahun 1995, karena data ketenagakerjaan dapat diperoleh dari Supas

1995. Tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, selain secara tahunan, Sakernas juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 hingga tahun 2008 Sakernas dilaksanakan secara semesteran, yaitu semester I pada bulan Februari dan semester II pada bulan Agustus. Pada tahun 2005 Sakernas semester II yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Agustus terpaksa dilaksanakan pada bulan November karena pada bulan Agustus-Oktober 2005 BPS melaksanakan kegiatan survei yang sangat *urgent* berskala nasional lainnya.

Dalam melaksanakan Sakernas, BPS merujuk pada konsep/definisi ketenagakerjaan yang direkomendasikan oleh *International Labour Organization* (ILO) sebagaimana tercantum dalam buku **“Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment” An ILO Manual on Concepts and Methods, ILO 1992.**

Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah *satu hari* atau *satu minggu*. Periode referensi satu minggu (yang lalu) paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai *employed* (bekerja).

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalam pelaksanaan Sakernas digunakan konsep/definisi *“bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu”* untuk mengkategorikan seseorang (*currently economically active population*) sebagai *bekerja*, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

1. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Angka Pengangguran

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Penduduk usia kerja pada Februari 2008 mengalami

Bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu digunakan untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

Pada Februari 2008, penduduk usia kerja mencapai 165,6 juta orang, angkatan kerja mencapai 111,48 juta orang dan yang bekerja 102,05 juta orang.

peningkatan sebesar 3,2 juta orang dibandingkan Februari 2007, yaitu dari 162,4 juta orang pada Februari 2007 menjadi 165,6 juta orang pada Februari 2008. Pada Februari 2008, sekitar 67,33 persen dari seluruh penduduk usia kerja merupakan tenaga kerja aktif dalam kegiatan ekonomi dan disebut dengan angkatan kerja yang besarnya mencapai 111,48 juta orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 1,54 juta orang (1,4 persen) dibandingkan dengan keadaan Agustus 2007, dan meningkat sebesar 3,35 juta orang (3,0 persen) dibandingkan keadaan Februari 2007.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sejak Februari 2007 hingga Februari 2008 TPAK mengalami peningkatan sebesar 1,23 persen, yaitu dari 66,60 persen pada Februari 2007 menjadi 67,33 persen pada Februari 2008. Peningkatan TPAK ini antara lain disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi nasional yang relarif membaik, sehingga memberikan pengaruh terhadap faktor-faktor produksi di Indonesia. Secara langsung naik turunnya faktor produksi ini akan memberikan dampak terhadap tinggi rendahnya faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja.

Pada Februari 2008, dari total angkatan kerja sebesar 111,48 juta, orang, sekitar 91,54 persennya adalah penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja pada keadaan Februari 2008 bertambah sebanyak 2,12 juta orang (2,1 persen) dibandingkan keadaan Agustus 2007 dan bertambah sebanyak 4,47 juta orang (4,4 persen) dibandingkan keadaan setahun yang lalu (Februari 2007).

Isu penting yang perlu menjadi perhatian adalah isu pengangguran. Konsep penganggur yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka (*open unemployment*). Jumlah penganggur pada Februari 2008 sebesar 9,4 juta orang atau mengalami penurunan sebesar 1,1 juta orang (11,9%) dibandingkan keadaan Februari 2007 yang besarnya 10,5 juta orang.

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat pengangguran terbuka (TPT), di mana TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2008 sebesar 8,46 persen, mengalami penurunan sebesar 1,29 persen dibandingkan TPT pada Februari 2007 yang besarnya 9,75.

Jumlah penganggur pada Februari 2008 sebesar 9,4 juta orang, menurun 11,9% dibanding Februari 2007.

Tabel 6.1
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan, 2006–2008
(dalam ribuan)

Kegiatan (1)	2006		2007		2008
	Februari (2)	Agustus (3)	Februari (4)	Agustus (5)	Februari (6)
Penduduk 15+	159 257,68 (100,00)	160 811,50 (100,00)	162 352,05 (100,00)	164 118,32 (100,00)	165 565,99 (100,00)
Angkatan Kerja	106 281,80 (66,74)	106 388,94 (66,16)	108 131,06 (66,60)	109 941,36 (66,99)	111 477,45 (67,33)
Bekerja	95 177,10 (89,55)	95 456,94 (89,72)	97 583,14 (90,25)	99 930,22 (90,89)	102 049,86 (91,54)
Penganggur	11 104,69 (10,45)	10 932,00 (10,28)	10 547,92 (9,75)	10 011,14 (9,11)	9 427,59 (8,46)
Bukan Angkatan Kerja	52 975,89 (33,26)	54 422,56 (33,84)	54 220,99 (33,40)	54 176,96 (33,01)	54 088,55 (32,67)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	(66,74)	(66,16)	(66,60)	(66,99)	(67,33)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	(10,45)	(10,28)	(9,75)	(9,11)	(8,46)
Setengah Pengangguran	29 924,63	29 100,75	30 238,98	30 370,18	30 644,44
Terpaksa	14 210,37	13 774,87	14 914,50	14 898,19	14 595,15
Sukarela	15 714,26	15 325,88	15 324,48	15 471,99	16 049,29

2. Lapangan Pekerjaan Utama

Pada Februari 2008, penduduk yang bekerja, paling banyak bekerja di sektor pertanian yaitu 42,69 juta orang.

Berdasarkan lapangan pekerjaan pada Februari 2008, dari 102,05 juta penduduk yang bekerja, paling banyak bekerja di sektor pertanian yaitu 42,69 juta orang (41,83 persen); disusul sektor perdagangan sebesar 20,68 juta orang (20,27 persen), dan sektor jasa sebesar 12,78 juta (12,52 persen).

Selama satu tahun terakhir peningkatan jumlah penduduk yang bekerja tertinggi terjadi pada sektor jasa kemasyarakatan yang mengalami peningkatan 1,82 juta orang diikuti oleh sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi dengan kenaikan 1,26 juta orang. Konsentrasi penyerapan masih didominasi oleh Pulau Jawa, di mana peranan sektor pertanian, industri maupun perdagangan dalam penyerapan tenaga kerja tampak lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain.

Tabel 6.2
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2006–2008 (dalam jutaan)

Lapangan Pekerjaan Utama	2006		2007		2008
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	42,32	40,14	42,61	41,21	42,69
Industri	11,58	11,89	12,09	12,37	12,44
Konstruksi	4,37	4,70	4,40	5,25	4,73
Perdagangan	18,56	19,22	19,43	20,55	20,68
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5,47	5,66	5,58	5,96	6,01
Kuangan	1,15	1,35	1,25	1,40	1,44
Jasa Kemasyarakatan	10,57	11,36	10,96	12,02	12,78
Lainnya *)	1,15	1,15	1,27	1,17	1,27
Total	95,18	95,46	97,58	99,93	102,05

**) Mencakup: 1. Pertambangan dan penggalan; 2. Listrik, gas, dan air bersih*

3. Status Pekerjaan Utama

Kegiatan formal dan informal secara kasar dapat didefinisikan berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori

berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan. Jika melihat status pekerjaan berdasarkan klasifikasi formal dan informal, maka pada Februari 2008 sekitar 31 persen tenaga kerja bekerja pada kegiatan formal dan 69 persen bekerja pada kegiatan informal.

Berdasarkan tabel 6.3 terlihat bahwa dari 102,05 juta orang yang bekerja, jumlah buruh dan karyawan di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 28,52 juta jiwa (27,94 persen) dari jumlah penduduk yang bekerja. Sementara jumlah penduduk yang berusaha di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 44,66 juta jiwa terdiri dari mereka yang berusaha sendiri 20,08 juta orang, berusaha dibantu buruh tidak tetap 21,60 juta orang, dan berusaha dibantu buruh tetap 2,98 juta orang. Jumlah pekerja tidak dibayar di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 17,94 juta jiwa atau 17,58 persen dari jumlah penduduk yang bekerja.

Pada Februari 2008 sekitar 31 persen tenaga kerja bekerja pada kegiatan formal dan 69 persen bekerja pada kegiatan informal.

Tabel 6.3
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama, 2006–2008 (dalam ribuan)

Status Pekerjaan Utama	2006		2007		2008
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	18 301,66 (19,23)	19 504,63 (20,43)	18 667,33 (19,13)	20 324,53 (20,34)	20 081,13 (19,68)
Berusaha dengan dibantu Anggota Rumah tangga	20 632,98 (21,68)	19 946,73 (20,90)	20 848,54 (21,36)	21 024,30 (21,04)	21 599,78 (21,17)
Berusaha dengan Buruh Tetap	2 813,77 (2,96)	2 850,45 (2,99)	2 847,69 (2,92)	2 883,83 (2,89)	2 979,41 (2,92)
Pekerja/Buruh/Karyawan	25 972,95 (27,29)	26 821,89 (28,10)	26 869,05 (27,53)	28 042,39 (28,06)	28 515,36 (27,94)
Pekerja Bebas di Pertanian	5 886,37 (6,18)	5 541,16 (5,80)	6 278,47 (6,43)	5 917,32 (5,92)	6 130,48 (6,01)
Pekerja Bebas di Non Pertanian	4 244,13 (4,46)	4 618,28 (4,84)	4 267,06 (4,37)	4 458,86 (4,46)	4 798,86 (4,70)
Pekerja Tak Dibayar	17 325,25 (18,20)	16 173,80 (16,94)	17 805,00 (18,25)	17 279,00 (17,29)	17 944,84 (17,58)
Total	95 177,10 (100,00)	95 456,94 (100,00)	97 583,14 (100,00)	99 930,22 (100,00)	102 049,86 (100,00)

Keterangan: Angka dalam tanda kurung menunjukkan persentase

4. Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran Menurut Provinsi

Selama periode Februari 2007–Februari 2008 penurunan pengangguran terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 281 ribu orang, tetapi provinsi tersebut juga mempunyai penganggur terbesar, yaitu 2,26 juta orang.

Selama periode Februari 2007–Februari 2008 umumnya jumlah pengangguran di berbagai provinsi mengalami penurunan. Penurunan pengangguran terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 281 ribu orang, kemudian diikuti Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan masing-masing penurunan sebesar 202 ribu orang dan 198 ribu orang, sedangkan jumlah pengangguran yang mengalami peningkatan terjadi di tujuh provinsi yaitu: Riau, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Jumlah penganggur paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat sebesar 2,26 juta orang dan yang paling sedikit di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 27,15 ribu orang.

Pada umumnya TPT di setiap provinsi untuk keadaan Februari 2008 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Terdapat 2 provinsi yang mengalami kenaikan TPT yaitu provinsi Sulawesi Tengah (dari 7,01 persen menjadi 7,25 persen) dan Sulawesi Barat (dari 4,09 persen menjadi 5,68 persen). TPT tertinggi pada Februari 2008 di Provinsi Banten (14,15 persen) dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (3,70 persen).

Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut jumlah jam kerja 2006–2008, Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dari penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut provinsi, angkatan kerja menurut pendidikan yang ditamatkan, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan, dan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menganggur menurut provinsi, 2006–2008 dapat dilihat pada *Penjelasan Teknis Statistik*.

Tabel 6.4
Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja, Bekerja dan Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi, Februari 2007–Februari 2008

Provinsi	Angkatan Kerja (juta)		Bekerja (juta)		Pengangguran (ribu)		Tingkat Pengangguran (%)	
	Feb 2007	Feb 2008	Feb 2007	Feb 2008	Feb 2007	Feb 2008	Feb 2007	Feb 2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam	1,79	1,78	1,61	1,62	183,82	163,87	10,27	9,20
Sumatera Utara	5,65	5,93	5,05	5,36	600,10	566,48	10,63	9,55
Sumatera Barat	2,00	2,13	1,78	1,92	220,38	206,74	11,02	9,73
Riau	1,89	2,23	1,69	2,03	196,31	208,93	10,39	9,35
Jambi	1,26	1,26	1,17	1,18	84,74	74,22	6,74	5,91
Sumatera Selatan	3,39	3,45	3,04	3,16	352,76	292,05	10,40	8,45
Bengkulu	0,87	0,84	0,82	0,80	44,47	33,29	5,12	3,98
Lampung	3,45	3,66	3,17	3,43	285,93	230,39	8,29	6,30
Bangka Belitung	0,51	0,50	0,47	0,47	37,67	29,02	7,36	5,79
Kepulauan Riau	0,64	0,65	0,58	0,60	56,71	55,38	8,86	8,49
DKI Jakarta	4,09	4,56	3,54	4,05	542,00	504,13	13,27	11,06
Jawa Barat	17,53	18,43	14,99	16,16	2 543,18	2 262,41	14,51	12,28
Jawa Tengah	17,74	17,34	16,30	16,11	1 436,89	1 234,65	8,10	7,12
D. I. Yogyakarta	1,95	1,98	1,84	1,86	118,88	119,79	6,08	6,04
Jawa Timur	19,52	20,12	18,07	18,86	1 454,31	1 255,89	7,45	6,24
Banten	3,98	4,25	3,34	3,65	641,36	601,84	16,11	14,15
Bali	2,01	2,09	1,91	2,00	98,31	95,51	4,89	4,56
Nusa Tenggara Barat	2,11	2,07	1,95	1,97	159,71	107,80	7,55	5,20
Nusa Tenggara Timur	2,10	2,21	2,02	2,13	83,57	81,77	3,98	3,70
Kalimantan Barat	2,19	2,17	2,03	2,03	154,88	140,56	7,08	6,49
Kalimantan Tengah	1,10	1,08	1,05	1,03	55,24	51,62	5,02	4,79
Kalimantan Selatan	1,60	1,71	1,49	1,59	117,23	118,37	7,31	6,91
Kalimantan Timur	1,26	1,25	1,10	1,11	161,93	142,51	12,83	11,41
Sulawesi Utara	1,09	1,05	0,94	0,92	141,65	129,30	13,04	12,35
Sulawesi Tengah	1,11	1,22	1,03	1,13	77,82	88,43	7,01	7,25
Sulawesi Selatan	3,20	3,28	2,82	2,93	384,81	343,76	12,01	10,49
Sulawesi Tenggara	0,99	0,96	0,92	0,91	68,69	58,25	6,93	6,05
Gorontalo	0,41	0,42	0,38	0,39	29,46	29,81	7,26	7,04
Sulawesi Barat	0,46	0,48	0,44	0,45	18,74	27,15	4,09	5,68
Maluku	0,53	0,55	0,46	0,49	76,44	61,23	14,37	11,05
Maluku Utara	0,40	0,42	0,37	0,39	33,77	29,34	8,34	7,03
Papua Barat	0,31	0,34	0,27	0,31	31,07	32,00	10,18	9,30
Papua	1,00	1,05	0,94	1,00	55,12	51,13	5,52	4,85
Indonesia	108,13	111,48	97,58	102,05	10 547,92	9 427,59	9,75	8,46

**ANGKA PRODUKSI PADI
DAN PALAWJA**

<http://www.bps>

7

ANGKA PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA

Data produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan salah satu indikator ketersediaan pangan nasional. Penghitungan produksi padi dan palawija secara nasional dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Departemen Pertanian (Deptan) untuk melaksanakan cara penghitungan produksi tanaman pangan yang sama agar diperoleh hasil yang seragam dan tepat sehingga dapat digunakan secara nasional.

Tujuan penyediaan data produksi padi dan palawija secara berkesinambungan adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan terkini bagi kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum. Diharapkan data tersebut dapat digunakan untuk bahan perencanaan/perumusan kebijakan berkaitan dengan ketahanan pangan nasional, sekaligus sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan.

*Angka Tetap
(Atap)
produksi padi
tahun 2007
sebesar 57,16
juta ton Gabah
Kering Giling
(GKG).*

Data pokok untuk menghitung produksi padi dan palawija adalah data luas panen dan produktivitas (hasil per hektar). Di samping itu, untuk mengoreksi hasil penghitungan luas panen diperlukan pula data luas lahan puso/rusak, luas tanam dan luas baku lahan sawah. Secara sederhana penghitungan produksi padi atau palawija merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas.

Dalam satu tahun, data produksi padi dan palawija disajikan sebanyak lima kali dengan status angka yang berbeda, yaitu: Angka Ramalan I (Aram I), Angka Ramalan II (Aram II), Angka Ramalan III (Aram III), Angka Sementara (Asem), dan Angka Tetap (Atap). Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca pada lampiran *Penjelasan Teknis Statistik*.

1. Angka Tetap Produksi Padi Tahun 2007

Angka Tetap (Atap) produksi padi tahun 2007 sebesar 57,16 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Dibandingkan dengan produksi tahun 2006, terjadi kenaikan sebanyak 2,70 juta ton

Angka Produksi Padi dan Palawija

(4,96 persen). Kenaikan produksi terjadi karena peningkatan luas panen seluas 361,21 ribu hektar (3,06 persen) dan juga produktivitas sebesar 0,85 kuintal/hektar (1,84 persen).

Kenaikan produksi padi tahun 2007 tersebut terjadi di luar Jawa sebesar 2,20 juta ton (8,97 persen) dan di Jawa sebesar 0,51 juta ton (1,69 persen). Peningkatan produksi tersebut disebabkan oleh naiknya luas panen sebesar 393,85 ribu hektar (6,47 persen) dan juga produktivitas sebesar 0,94 kuintal/hektar (2,33 persen). Di Jawa, kenaikan produksi disebabkan oleh peningkatan produktivitas sebesar 1,19 kuintal/hektar (2,27 persen), sedangkan luas panen mengalami penurunan seluas 32,64 ribu hektar (0,57 persen).

Kenaikan produksi padi tahun 2007 di luar Jawa terjadi di beberapa provinsi terutama di Provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Lampung, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Barat. Sementara di Jawa, peningkatan produksi padi terutama terjadi di Provinsi Jawa Barat.

Kenaikan produksi padi tahun 2007 sebanyak 2,70 juta ton (4,96 persen) terjadi pada *subround* Mei–Agustus sebesar 3,51 juta ton (18,87 persen) dan *subround* September–Desember sebesar 2,81 juta ton (28,24 persen), sedangkan pada *subround* Januari–April mengalami penurunan sebesar 3,61 juta ton (13,94 persen) dibandingkan dengan produksi pada *subround* yang sama tahun 2006 (*year on year*).

2. Angka Ramalan II Produksi Padi Tahun 2008

Angka Ramalan II (Aram II) produksi padi tahun 2008 diperkirakan sebesar 59,88 juta ton GKG. Dibandingkan produksi tahun 2007 (Atap), terjadi kenaikan sebanyak 2,72 juta ton (4,76 persen). Kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen seluas 237,61 ribu hektar (1,96 persen) dan juga produktivitas sebesar 1,30 kuintal/hektar (2,76 persen).

Kenaikan produksi padi tahun 2008 tersebut diperkirakan terjadi di Jawa sebesar 1,68 juta ton (5,52 persen) dan di luar Jawa sebesar 1,04 juta ton (3,89 persen). Di Jawa, peningkatan

Kenaikan produksi padi tahun 2007 terjadi di luar Jawa sebesar 2,20 juta ton (8,97 persen) dan di Jawa sebesar 0,51 juta ton (1,69 persen).

produksi disebabkan oleh naiknya luas panen sebesar 154,99 ribu hektar (2,73 persen) dan juga produktivitas sebesar 1,46 kuintal/hektar (2,72 persen). Demikian juga di luar Jawa, kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen seluas 82,61 ribu hektar (1,28 persen) dan produktivitas sebesar 1,07 kuintal/hektar (2,60 persen).

Kenaikan produksi padi tahun 2008 di Jawa diperkirakan terjadi di beberapa provinsi terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sementara di luar Jawa kenaikan produksi terutama terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah.

Kenaikan produksi padi tahun 2008 sebanyak 2,72 juta ton (4,76 persen) diperkirakan terjadi pada *subround* Januari–April sebesar 5,55 juta ton (24,86 persen), sedangkan *subround* Mei–Agustus dan *subround* September–Desember diperkirakan mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,89 juta ton (8,57 persen) dan 0,94 juta ton (7,33 persen) dibandingkan dengan produksi pada *subround* yang sama tahun 2007 (*year on year*).

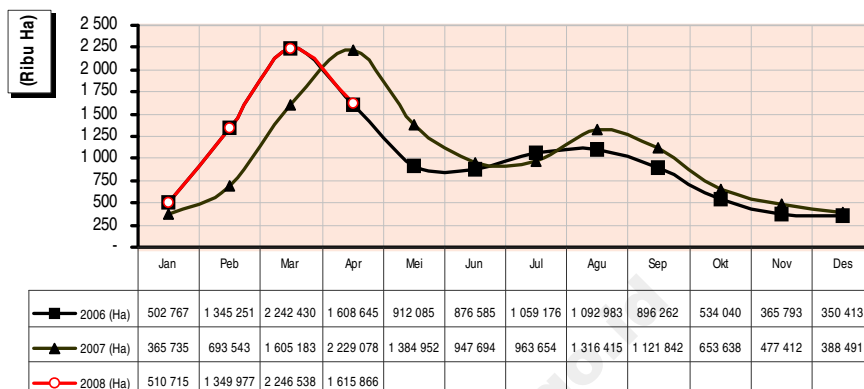
Pada tahun 2007 terjadi pergeseran puncak panen padi dari bulan Maret pada tahun 2006 menjadi bulan April. Sedangkan tahun 2008 puncak panen kembali ke bulan Maret.

3. Pola Panen Padi Bulanan Tahun 2006–2008

Pada tahun 2007 terjadi pergeseran puncak panen padi dari bulan Maret pada tahun 2006 menjadi bulan April. Sedangkan tahun 2008 puncak panen kembali ke bulan Maret. Sementara panen raya kedua pada tahun 2006 dan 2007 terjadi pada bulan Agustus (Gambar 7.1).

Angka Produksi Padi dan Palawija

Gambar 7.1
Pola Panen Padi Bulanan Tahun 2006–2008



Tabel 7.1
Perbandingan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Menurut Wilayah di Indonesia Tahun 2006–2008

Uraian	2006	2007	2008 (Aram II)	Perkembangan			
				2006-2007		2007-2008	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
• Jawa	5 703 589	5 670 947	5 825 941	-32 642	-0,57	154 994	2,73
• Luar Jawa	6 082 841	6 476 690	6 559 301	393 849	6,47	82 611	1,28
• Indonesia	11 786 430	12 147 637	12 385 242	361 207	3,06	237 605	1,96
b. Produktivitas (ku/ha)							
• Jawa	52,53	53,72	55,18	1,19	2,27	1,46	2,72
• Luar Jawa	40,27	41,21	42,28	0,94	2,33	1,07	2,60
• Indonesia	46,20	47,05	48,35	0,85	1,84	1,30	2,76
c. Produksi (ton)							
• Jawa	29 960 638	30 466 339	32 147 328	505 701	1,69	1 680 989	5,52
• Luar Jawa	24 494 299	26 691 096	27 729 891	2 196 797	8,97	1 038 795	3,89
• Indonesia	54 454 937	57 157 435	59 877 219	2 702 498	4,96	2 719 784	4,76

Keterangan: Bentuk produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

Tabel 7.2
Perbandingan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi
Menurut Subround di Indonesia Tahun 2006–2008

Uraian	2006	2007	2008 (Aram II)	Perkembangan			
				2006-2007		2007-2008	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
• Januari-April	5 699 093	4 893 539	5 723 096	-805 554	-14,13	829 557	16,95
• Mei-Agustus	3 940 829	4 612 715	4 191 076	671 886	17,05	-421 639	-9,14
• September-Desember	2 146 508	2 641 383	2 471 070	494 875	23,05	-170 313	-6,45
• Januari-Desember	11 786 430	12 147 637	12 385 242	361 207	3,06	237 605	1,96
b. Produktivitas (ku/ha)							
• Januari-April	45,49	45,59	48,68	0,10	0,22	3,09	6,78
• Mei-Agustus	47,14	47,88	48,18	0,74	1,57	0,30	0,63
• September-Desember	46,36	48,31	47,86	1,95	4,21	-0,45	-0,93
• Januari-Desember	46,20	47,05	48,35	0,85	1,84	1,30	2,76
c. Produksi (ton)							
• Januari-April	25 925 145	22 311 774	27 858 961	-3 613 371	-13,94	5 547 187	24,86
• Mei-Agustus	18 578 132	22 083 944	20 192 015	3 505 812	18,87	-1 891 929	-8,57
• September-Desember	9 951 660	12 761 717	11 826 243	2 810 057	28,24	-935 474	-7,33
• Januari-Desember	54 454 937	57 157 435	59 877 219	2 702 498	4,96	2 719 784	4,76

Keterangan: Bentuk produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

4. Angka Tetap Produksi Jagung Tahun 2007

Angka Tetap produksi jagung tahun 2007 sebesar 13,29 juta ton pipilan kering, terjadi kenaikan 14,45 persen dibanding tahun 2006.

Angka Tetap (Atap) produksi jagung tahun 2007 sebesar 13,29 juta ton pipilan kering. Dibandingkan dengan produksi tahun 2006, terjadi kenaikan sebanyak 1,68 juta ton (14,45 persen). Kenaikan produksi terjadi karena peningkatan luas panen seluas 284,52 ribu hektar (8,50 persen) dan juga produktivitas sebesar 1,90 kuintal/hektar (5,48 persen).

Kenaikan produksi jagung tahun 2007 tersebut terjadi di luar Jawa sebesar 1,02 juta ton (20,81 persen) dan di Jawa sebesar 0,65 juta ton (9,78 persen). Di luar Jawa, peningkatan produksi disebabkan oleh naiknya luas panen sebesar 161,04 ribu hektar (10,36 persen) dan juga produktivitas sebesar 2,99 kuintal/hektar (9,44 persen). Demikian juga di Jawa, kenaikan produksi disebabkan oleh peningkatan luas panen seluas 123,48 ribu hektar (6,89 persen) dan produktivitas sebesar 1,01 kuintal/hektar (2,70 persen).

Angka Produksi Padi dan Palawija

Kenaikan produksi jagung tahun 2007 di luar Jawa terjadi di beberapa provinsi terutama di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Lampung, Gorontalo, dan Sumatera Utara. Sementara di Jawa, peningkatan produksi jagung terutama terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kenaikan produksi jagung tahun 2007 sebanyak 1,68 juta ton (14,45 persen) terjadi pada *subround* Januari–April sebesar 279,67 ribu ton (4,34 persen), *subround* Mei–Agustus sebesar 592,75 ribu ton (19,28 persen), dan *subround* September–Desember sebesar 805,64 ribu ton (38,57 persen) dibandingkan dengan produksi pada *subround* yang sama tahun 2006 (*year on year*).

5. Angka Ramalan II Produksi Jagung Tahun 2008

Angka Ramalan II (ARAM II) produksi jagung tahun 2008 diperkirakan sebesar 14,85 juta ton pipilan kering. Dibandingkan produksi tahun 2007 (ATAP), terjadi kenaikan sebanyak 1,57 juta ton (11,79 persen). Kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen seluas 178,67 ribu hektar (4,92 persen) dan produktivitas sebesar 2,40 kuintal/hektar (6,56 persen).

Kenaikan produksi jagung tahun 2008 tersebut diperkirakan terjadi di Jawa sebesar 0,56 juta ton (7,59 persen) dan di luar Jawa sebesar 1,01 juta ton (16,98 persen). Di Jawa, peningkatan produksi jagung disebabkan oleh naiknya luas panen sebesar 36,66 ribu hektar (1,91 persen) dan juga produktivitas sebesar 2,13 kuintal/hektar (5,55 persen). Demikian juga di luar Jawa, kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen seluas 142,01 ribu hektar (8,28 persen) dan produktivitas sebesar 2,79 kuintal/hektar (8,05 persen).

Kenaikan produksi jagung tahun 2008 di Jawa diperkirakan terjadi di beberapa provinsi terutama di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara di luar Jawa kenaikan produksi terutama terjadi di Provinsi Lampung, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Angka Ramalan II produksi jagung tahun 2008 diperkirakan sebesar 14,85 juta ton pipilan kering, terjadi kenaikan 11,79 persen dibanding tahun 2007.

Angka Produksi Padi dan Palawija

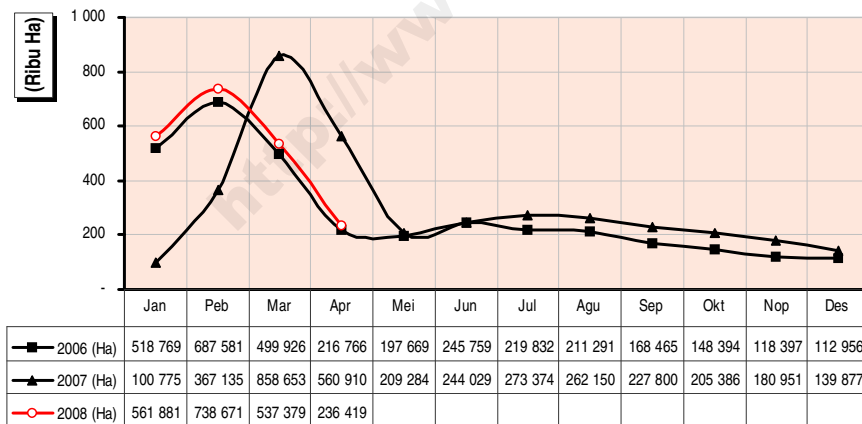
Kenaikan produksi jagung tahun 2008 sebanyak 1,57 juta ton (11,79 persen).

Kenaikan produksi jagung tahun 2008 sebanyak 1,57 juta ton (11,79 persen) diperkirakan terjadi pada *subround* Januari–April sebesar 1,48 juta ton (22,07 persen) dan *subround* Mei–Agustus sebesar 144,81 ribu ton (3,95 persen), sedangkan pada *subround* September–Desember diperkirakan mengalami penurunan sebesar 62,83 ribu ton (2,17 persen) dibandingkan dengan produksi pada *subround* yang sama tahun 2007 (*year on year*).

6. Pola Panen Jagung Bulanan Tahun 2006–2008

Pada tahun 2007 terjadi pergeseran puncak panen jagung dari bulan Februari pada tahun 2006 menjadi bulan Maret. Pada tahun 2008 puncak panen jagung kembali seperti pola panen pada tahun 2006, yaitu puncak panen pada bulan Februari (Gambar 7.2).

Gambar 7.2
Pola Panen Jagung Bulanan Tahun 2006–2008



Angka Produksi Padi dan Palawija

Tabel 7.3
Perbandingan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung Menurut Wilayah di Indonesia Tahun 2006–2008

Uraian	2006	2007	2008 (Aram II)	Perkembangan			
				2006-2007		2007-2008	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
• Jawa	1 791 370	1 914 854	1 951 517	123 484	6,89	36 663	1,91
• Luar Jawa	1 554 435	1 715 470	1 857 481	161 035	10,36	142 011	8,28
• Indonesia	3 345 805	3 630 324	3 808 998	284 519	8,50	178 674	4,92
b. Produktivitas (ku/ha)							
• Jawa	37,34	38,35	40,48	1,01	2,70	2,13	5,55
• Luar Jawa	31,66	34,65	37,44	2,99	9,44	2,79	8,05
• Indonesia	34,70	36,60	39,00	1,90	5,48	2,40	6,56
c. Produksi (ton)							
• Jawa	6 688 571	7 342 636	7 899 676	654 065	9,78	557 040	7,59
• Luar Jawa	4 920 892	5 944 891	6 954 374	1 023 999	20,81	1 009 483	16,98
• Indonesia	11 609 463	13 287 527	14 854 050	1 678 064	14,45	1 566 523	11,79

Keterangan: Bentuk produksi jagung adalah pipilan kering

Tabel 7.4
Perbandingan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung Menurut Subround di Indonesia Tahun 2006–008

Uraian	2006	2007	2008 (Aram II)	Perkembangan			
				2006-2007		2007-2008	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
• Januari-April	1 923 042	1 887 473	2 074 350	-35 569	-1,85	186 877	9,90
• Mei-Agustus	874 551	988 837	1 016 362	114 286	13,07	27 525	2,78
• September-Desember	548 212	754 014	718 286	205 802	37,54	-35 728	-4,74
• Januari-Desember	3 345 805	3 630 324	3 808 998	284 519	8,50	178 674	4,92
b. Produktivitas (ku/ha)							
• Januari-April	33,52	35,63	39,58	2,11	6,29	3,95	11,09
• Mei-Agustus	35,16	37,09	37,51	1,93	5,49	0,42	1,13
• September-Desember	38,10	38,38	39,42	0,28	0,73	1,04	2,71
• Januari-Desember	34,70	36,60	39,00	1,90	5,48	2,40	6,56
c. Produksi (ton)							
• Januari-April	6 445 786	6 725 452	8 209 999	279 666	4,34	1 484 547	22,07
• Mei-Agustus	3 075 112	3 667 865	3 812 674	592 753	19,28	144 809	3,95
• September-Desember	2 088 565	2 894 210	2 831 377	805 645	38,57	-62 833	-2,17
• Januari-Desember	11 609 463	13 287 527	14 854 050	1 678 064	14,45	1 566 523	11,79

Keterangan: Bentuk produksi jagung adalah pipilan kering

7. Angka Tetap Produksi Kedelai Tahun 2007

Angka Tetap produksi kedelai tahun 2007 sebesar 592,53 ribu ton biji kering, terjadi penurunan 20,74 persen dibanding tahun 2006.

Angka Tetap (Atap) produksi kedelai tahun 2007 sebesar 592,53 ribu ton biji kering. Dibandingkan dengan produksi tahun 2006, terjadi penurunan sebanyak 155,08 ribu ton (20,74 persen). Penurunan produksi terjadi karena penurunan luas panen seluas 121,42 ribu hektar (20,91 persen), sedangkan produktivitas mengalami peningkatan sebesar 0,03 kuintal/hektar (0,23 persen).

Penurunan produksi kedelai tahun 2007 tersebut terjadi di Jawa sebesar 93,44 ribu ton (18,02 persen) dan juga di luar Jawa sebesar 61,64 ribu ton (26,89 persen). Di Jawa, penurunan produksi disebabkan oleh turunnya luas panen sebesar 64,88 ribu hektar (16,61 persen) dan juga produktivitas sebesar 0,22 kuintal/hektar (1,66 persen). Di luar Jawa, penurunan produksi disebabkan oleh turunnya luas panen seluas 56,54 ribu hektar (29,76 persen), sedangkan produktivitas mengalami kenaikan sebesar 0,50 kuintal/hektar (4,15 persen).

Penurunan produksi kedelai tahun 2007 di Jawa terjadi di beberapa provinsi terutama di Provinsi Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sementara di luar Jawa, penurunan produksi kedelai terutama terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, dan Riau.

Angka Ramalan II produksi kedelai tahun 2008 diperkirakan sebesar 723,54 ribu ton biji kering, terjadi kenaikan 22,11 persen dibanding Atap 2007.

Penurunan produksi kedelai tahun 2007 sebanyak 155,08 ribu ton (20,74 persen) terjadi pada *subround* Januari–April sebesar 49,18 ribu ton (24,17 persen), *subround* Mei–Agustus sebesar 66,80 ribu ton (22,36 persen) dan *subround* September–Desember sebesar 39,10 ribu ton (15,94 persen) dibandingkan dengan produksi pada *subround* yang sama tahun 2006 (*year on year*).

8. Angka Ramalan II Produksi Kedelai Tahun 2008

Angka Ramalan II (Aram II) produksi kedelai tahun 2008 diperkirakan sebesar 723,54 ribu ton biji kering. Dibandingkan produksi tahun 2007 (Atap), terjadi kenaikan sebanyak 131,00 ribu ton (22,11 persen). Kenaikan produksi diperkirakan terjadi

Angka Produksi Padi dan Palawija

karena peningkatan luas panen seluas 90,30 ribu hektar (19,67 persen) dan produktivitas sebesar 0,26 kuintal/hektar (2,01 persen).

Kenaikan produksi kedelai tahun 2008 tersebut diperkirakan terjadi di Jawa sebesar 44,47 ribu ton (10,46 persen) dan di luar Jawa sebesar 86,53 ribu ton (51,64 persen). Di Jawa, peningkatan produksi diperkirakan disebabkan oleh naiknya luas panen sebesar 26,64 ribu hektar (8,18 persen) dan juga produktivitas sebesar 0,27 kuintal/hektar (2,07 persen). Demikian juga di luar Jawa, kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen seluas 63,66 ribu hektar (47,71 persen) dan produktivitas sebesar 0,33 kuintal/hektar (2,63 persen).

Kenaikan produksi kedelai tahun 2008 di Jawa diperkirakan terjadi di beberapa provinsi terutama di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa kenaikan produksi terutama terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, Jambi, dan Sumatera Utara.

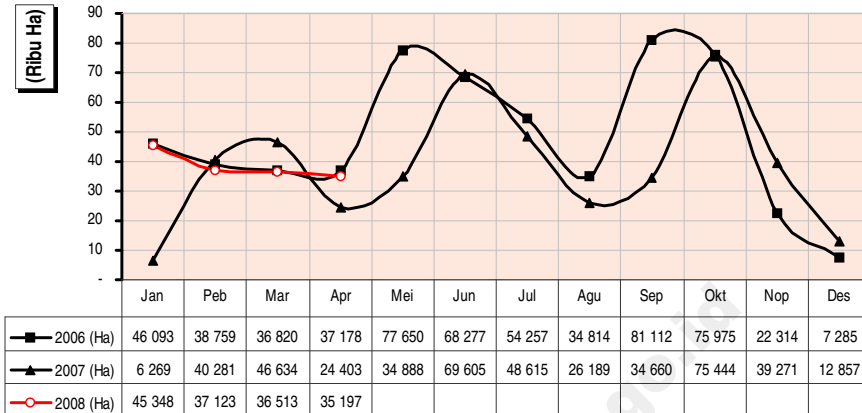
Kenaikan produksi kedelai tahun 2008 sebanyak 131,00 ribu ton (22,11 persen) diperkirakan terjadi pada *subround* Januari–April sebesar 54,64 ribu ton (35,41 persen), *subround* Mei–Agustus sebesar 34,46 ribu ton (14,85 persen) dan *subround* September–Desember sebesar 41,91 ribu ton (20,32 persen) dibandingkan dengan produksi pada *subround* yang sama tahun 2007 (*year on year*).

9. Pola Panen Bulanan Tahun 2006–2008

Pada tahun 2006 puncak panen kedelai terjadi pada bulan Mei dan September. Pada tahun 2007 mengalami pergeseran menjadi bulan Juni dan Oktober. Tahun 2008, pola panen kedelai diperkirakan akan kembali ke pola panen pada tahun 2006 (Gambar 7.3).

Kenaikan produksi kedelai tahun 2008 diperkirakan terjadi di Jawa sebesar 44,47 ribu ton (10,46 persen) dan di luar Jawa sebesar 86,53 ribu ton (51,64 persen).

Gambar 7.3
Pola Panen Kedelai Bulanan Tahun 2006–2008



Tabel 7.5
Perbandingan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai Menurut Wilayah di Indonesia Tahun 2006–2008

Uraian	2006	2007	2008 (Aram II)	Perkembangan			
				2006–2007		2007–2008	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
• Jawa	390 568	325 689	352 327	-64 879	-16,61	26 638	8,18
• Luar Jawa	189 966	133 427	197 085	-56 539	-29,76	63 658	47,71
• Indonesia	580 534	459 116	549 412	-121 418	-20,91	90 296	19,67
b. Produktivitas (ku/ha)							
• Jawa	13,27	13,05	13,32	-0,22	-1,66	0,27	2,07
• Luar Jawa	12,06	12,56	12,89	0,50	4,15	0,33	2,63
• Indonesia	12,88	12,91	13,17	0,03	0,23	0,26	2,01
c. Produksi (ton)							
• Jawa	518 425	424 986	469 460	-93 439	-18,02	44 474	10,46
• Luar Jawa	229 186	167 548	254 075	-61 638	-26,89	86 527	51,64
• Indonesia	747 611	592 534	723 535	-155 077	-20,74	131 001	22,11

Keterangan: Bentuk produksi kedelai adalah biji kering

Tabel 7.6
Perbandingan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai
Menurut Subround di Indonesia Tahun 2006–2008

Uraian	2006	2007	2008 (Aram II)	Perkembangan			
				2006-2007		2007-2008	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
• Januari-April	158 850	117 587	154 181	-41 263	-25,98	36 594	31,12
• Mei-Agustus	234 998	179 297	204 724	-55 701	-23,70	25 427	14,18
• September-Desember	186 686	162 232	190 507	-24 454	-13,10	28 275	17,43
• Januari-Desember	580 534	459 116	549 412	-121 418	-20,91	90 296	19,67
b. Produktivitas (ku/ha)							
• Januari-April	12,81	13,12	13,55	0,31	2,42	0,43	3,28
• Mei-Agustus	12,72	12,94	13,02	0,22	1,73	0,08	0,62
• September-Desember	13,14	12,71	13,02	-0,43	-3,27	0,31	2,44
• Januari-Desember	12,88	12,91	13,17	0,03	0,23	0,26	2,01
c. Produksi (ton)							
• Januari-April	203 490	154 312	208 948	-49 178	-24,17	54 636	35,41
• Mei-Agustus	298 808	232 008	266 463	-66 800	-22,36	34 455	14,85
• September-Desember	245 313	206 214	248 124	-39 099	-15,94	41 910	20,32
• Januari-Desember	747 611	592 534	723 535	-155 077	-20,74	131 001	22,11

Keterangan: Bentuk produksi kedelai adalah biji kering

PENJELASAN TEKNIS
STATISTIK

<http://www.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS STATISTIK

1. PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)

Perkembangan ekonomi akan sesuai dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi (*economic resources*). Sumber daya tersebut adalah tanah (*land*), tenaga kerja (*labor*), dan modal (*capital*). Ketiga sumber daya tersebut dalam ilmu ekonomi disebut sebagai faktor-faktor produksi (*factor of production*). Biasanya, faktor produksi tenaga kerja dibedakan ke dalam tenaga kerja dalam arti pekerja dan tenaga kerja dalam arti keahlian. Dengan menggunakan faktor produksi tersebut, input antara (*intermediate input*) atau bahan baku, misalnya, beberapa keping papan ditambah dengan bahan material lainnya, dapat diubah menjadi sebuah kursi, dengan harga yang lebih mahal bila dibandingkan dengan keping papan semula. Pengertian inilah yang relevan dengan istilah nilai tambah (*value added*).

Sebidang lahan, dikombinasikan dengan pemanfaatan faktor produksi lainnya, digunakan untuk menumbuhkan bibit padi dan menghasilkan padi yang mempunyai nilai yang lebih tinggi pada masa panen. Dengan mengkombinasikan faktor produksi dengan input antara (*intermediate input*) seperti kapas, dapat diproduksi barang lain yang nilainya lebih tinggi. Pengertian ini dapat diteruskan untuk seluruh bentuk input antara dan diproses menjadi *output*.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana faktor-faktor produksi mampu mengubah bahan baku (*intermediate input*) menjadi suatu produk (*output*) yang menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Dalam terminologi ekonomi, peningkatan nilai dari *input* menjadi *output* disebut sebagai nilai tambah (*value added*). Oleh karenanya nilai tambah merupakan "milik" faktor produksi, karena merupakan balas jasa faktor produksi.

Penjumlahan nilai tambah dalam satu periode tertentu di suatu wilayah tertentu dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Nilai tambah yang diciptakan, diklasifikasikan ke dalam 9 (sembilan) sektor ekonomi yaitu, sektor pertanian, pertambangan, industri manufaktur, perdagangan-hotel-restoran, bangunan, listrik-gas-air bersih, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, dan sektor jasa-jasa.

Nilai PDB disajikan melalui dua harga, yaitu atas dasar harga berlaku (*at current market prices*) dan harga konstan (*constant prices*). Konsep atas dasar

Penjelasan Teknis Statistik

harga konstan merupakan PDB atas dasar harga berlaku yang telah “dihilangkan” pengaruh perubahan harga. Oleh karenanya, tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDB atas penilaian harga konstan. Hal ini mengandung maksud bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar merupakan pertumbuhan volume barang dan jasa, bukan nilai yang masih mengandung perubahan harga.

PDB ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi neto dari luar negeri (*net factor income from abroad*) - pendapatan faktor produksi dari luar dikurangi dengan pendapatan faktor produksi yang ke luar negeri, akan menghasilkan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product (GNP)*. PNB dikurangi dengan pajak tak langsung neto dan penyusutan akan menghasilkan pendapatan nasional (*National Income*).

Penyusunan PDB menggunakan referensi baku yang disusun oleh *United Nations* dengan judul *A System of National Accounts (SNA)*. Acuan ini, secara terus-menerus diremajakan sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia yang terjadi. Indonesia sedang menuju acuan SNA 1993, walaupun belum secara keseluruhan.

Wilayah Domestik

Semua barang dan jasa sebagai hasil kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya dimiliki atau dikuasai oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik wilayah bersangkutan. *Output* yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan produk domestik. Wilayah domestik adalah suatu daerah yang meliputi daratan dan lautan yang berada di dalam batas-batas geografis daerah tersebut.

Output

Output perusahaan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu meliputi produksi utama, produksi ikutan maupun produksi sampingan. *Output* tersebut merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan unit harganya.

Beberapa pengertian *output* secara lebih rinci dijelaskan berikut ini. Barang dan jasa yang diproduksi selama suatu periode tertentu sebagian besar mungkin dijual pada periode yang sama, juga termasuk barang dan jasa yang dibuat untuk diberikan kepada pegawainya sendiri. Sisanya merupakan stok produsen dalam bentuk barang jadi dan atau setengah jadi. Barang setengah jadi meliputi barang yang masih dalam proses pembuatan atau perakitan.

Barang setengah jadi pada sektor konstruksi dicatat sebagai *output* barang

jadi sektor tersebut dan merupakan pembentukan modal tetap bruto. Pertambahan nilai dari kayu dan tanaman yang masih tumbuh tidak termasuk dalam perhitungan *output*, karena belum dianggap sebagai komoditi. *Output* lapangan usaha yang memproduksi barang untuk tujuan dipasarkan selama suatu periode tertentu, biasanya tidak sama dengan penerimaan penjualan pada periode tersebut. Barang yang dijual pada suatu periode sebagian diperoleh dari stok produksi periode yang lalu dan sebaliknya produksi periode sekarang tidak seluruhnya terjual pada periode yang sama, akan tetapi sebagian merupakan stok untuk dijual pada periode selanjutnya.

Biaya Antara

Biaya antara terdiri dari barang dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi. Pengeluaran untuk barang dan jasa sebagai suatu kewajiban untuk penyelesaian pekerjaan, diperlakukan sebagai biaya antara. Termasuk juga sebagai biaya antara adalah pembelian peralatan kerja buruh tambang seperti lampu dan bahan peledak atau peralatan kerja buruh tani atas dasar suatu kontrak. Pengeluaran untuk transpor pegawai ke dan dari tempat bekerja dimasukkan sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Perlakuan ini dipakai karena pengeluaran transportasi tersebut sepenuhnya merupakan keputusan yang dilakukan oleh pegawai. Penggantian uang perjalanan, makan, dan sejenisnya yang diadakan oleh pegawai dalam hubungannya untuk melaksanakan tugas, diperlakukan sebagai biaya antara. Pengeluaran perusahaan untuk jasa kesehatan, obat-obatan dan rekreasi untuk pegawainya pada umumnya diperlakukan sebagai biaya antara, karena pengeluaran ini adalah untuk kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan pegawai secara individu.

Nilai Tambah

Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan atas nilai barang dan jasa sebagai biaya antara agar menjadi *output*. Oleh karenanya secara matematis nilai tersebut dapat dihitung menggunakan formula sederhana berikut ini.

$$\begin{aligned} \text{NTB} &= \text{Output} - \text{Input antara} \\ \text{NTB} &= \text{nilai tambah bruto} \end{aligned}$$

Nilai tambah bruto merupakan balas jasa faktor produksi, yang terdiri dari komponen (a) pendapatan faktor, (b) penyusutan barang modal tetap, (c) pajak tak langsung neto, sedangkan jika penyusutan dikeluarkan dari nilai tambah

Penjelasan Teknis Statistik

bruto maka akan diperoleh nilai tambah neto. Pendapatan faktor merupakan nilai tambah produsen atas penggunaan faktor faktor produksi dalam proses produksi, yang terdiri dari unsur-unsur:

- 1) Upah dan gaji sebagai balas jasa pegawai
- 2) Sewa tanah sebagai balas jasa tanah
- 3) Bunga sebagai balas jasa modal
- 4) Keuntungan sebagai balas jasa kewiraswastaan.

Faktor pendapatan yang ditimbulkan oleh produsen komoditi meliputi seluruh unsur pendapatan faktor tersebut, sedang yang ditimbulkan oleh tenaga kerja hanya terdiri dari unsur upah dan gaji.

1.1 Pendekatan Penyusunan PDB

Penjelasan yang telah diberikan merupakan PDB yang disusun menggunakan pendekatan produksi. Dalam penyusunan PDB ada 3 (tiga) pendekatan, yaitu (a) Pendekatan Produksi, (b) Pendekatan Penggunaan atau sering disebut sebagai Pendekatan Pengeluaran, dan terakhir (c) yang sampai hari ini belum dilakukan adalah Pendekatan Pendapatan.

Pendekatan produksi (*Production approach*)

Dalam pendekatan ini PDB dihitung sebagai jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi dalam suatu wilayah atau suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Penggunaan sampai saat ini, sektor-sektor ekonomi tersebut dikelompokkan menjadi sembilan lapangan usaha (*activities*) yaitu:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Pengalihan;
3. Industri Pengolahan;
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih;
5. Konstruksi;
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran;
7. Pengangkutan dan Komunikasi;
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan;
9. Jasa-jasa.

PDB pendekatan produksi menghasilkan PDB sektoral karena di dalamnya dirinci PDB yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi, dan setiap sektor tersebut dapat dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

Pendekatan Penggunaan (*Expenditure Approach*)

PDB yang disusun dari sisi produksi besarnya harus sama dengan PDB yang disusun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) dan diistilahkan juga dengan penggunaan. Secara agregat terdapat lima komponen, yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Pendekatan pendapatan (*Income approach*)

Menggunakan pendekatan ini, PDB dihitung sebagai jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi. Balas jasa tersebut terdiri dari: upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (*interests*) sebagai balas jasa modal, dan keuntungan (balas jasa ketrampilan). Dalam penghitungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan (*income tax*) dan pajak langsung lainnya (*other direct taxes*). Dalam definisi ini, PDB masih mencakup penyusutan (*depreciation*) dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi) atau *net indirect taxes*.

Secara konsepsi, penghitungan PDB dengan menggunakan salah satu dari ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. Hanya sayang, PDB pendekatan pendapatan, karena keterbatasan data, belum dapat disajikan.

1.2 Komponen PDB Penggunaan

Ada 6 (enam) komponen penggunaan: pengeluaran konsumsi rumahtangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok atau *inventory*, dan ekspor serta impor.

Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa. Untuk perkiraan besarnya nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga digunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data pokok. Selanjutnya perkiraan pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, serta penyempurnaan estimasi pengeluaran konsumsi rumah

Penjelasan Teknis Statistik

tangga dilakukan melalui proses rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Tabel Input-Output (I-O) 2000.

Perkiraan besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara revaluasi untuk kelompok makanan dan deflasi untuk kelompok bukan makanan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) bukan makanan yang sesuai sebagai *deflator*-nya.

Konsumsi Pemerintah

Pemerintah sebagai konsumen akhir mencakup pemerintah umum yang terdiri dari pemerintah pusat yang meliputi unit departemen, lembaga non-departemen dan lembaga pemerintah lainnya, serta pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan daerah di bawahnya. Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang-barang pemerintah, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin), tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah yang bukan dikonsumsi sendiri oleh pemerintah tetapi dikonsumsi oleh masyarakat.

Data dasar yang dipakai adalah realisasi belanja pemerintah dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perbendaharaan, Departemen Keuangan. Estimasi konsumsi pemerintah dihitung dari konsumsi pemerintah pusat, serta data realisasi pengeluaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Besarnya penyusutan pemerintah pusat (hasil suatu survei) diperkirakan dua puluh persen dari nilai pembentukan modal tetap bruto pemerintah, sedangkan penyusutan untuk pemerintah daerah sekitar lima persen dari jumlah belanja pegawainya.

Perkiraan pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2000 untuk belanja pegawai dihitung dengan cara ekstrapolasi menggunakan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya, sedangkan untuk belanja barang dihitung dengan cara deflasi menggunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor sebagai deflatornya.

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap domestik bruto didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam

negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan biasanya mempunyai umur pakai satu tahun atau lebih.

Pembentukan modal tetap domestik bruto dapat dibedakan atas: a) pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi; b) pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan; c) pembentukan modal dalam bentuk alat angkutan; dan d) pembentukan modal untuk barang modal lainnya.

Sumber data yang digunakan berasal dari hasil perhitungan output sektor konstruksi oleh Direktorat Neraca Produksi BPS, publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, Statistik Impor yang diterbitkan oleh BPS. Metode yang digunakan dalam penghitungan pembentukan modal tetap adalah pendekatan arus barang.

Perubahan Inventori

Perubahan inventori dihitung dari pengurangan posisi inventori pada akhir tahun dengan posisi inventori pada awal tahun. Data mengenai nilai perubahan inventori yang mempunyai data kuantum, seperti: komoditi perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan dan industri berasal dari publikasi masing-masing direktorat terkait di BPS, yaitu Statistik Pertanian, Statistik Pertambangan, Statistik Industri Besar dan Sedang, dengan mengalikan kuantum dan harga masing-masing komoditi. Sementara itu, data inventori yang tidak mempunyai kuantum diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan yang memuat nilai inventori di dalamnya.

Penghitungan perubahan inventori atas dasar harga konstan 2000 untuk komoditi inventori yang mempunyai data kuantum dilakukan dengan cara revaluasi, sedangkan untuk komoditi inventori yang tidak mempunyai kuantum dilakukan dengan cara deflasi dengan IHPB yang sesuai sebagai deflatornya.

Diskrepansi statistik merupakan selisih penjumlahan nilai tambah bruto (PDB) sektoral dengan penjumlahan komponen permintaan akhir, seperti: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto dan ekspor neto. Jadi, diskrepansi statistik merupakan selisih statistik yang terdapat pada sektor atau komponen lainnya.

Ekspor dan Impor

Ekspor dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain, yang meliputi ekspor dan impor barang, jasa pengangkutan, jasa asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa

Penjelasan Teknis Statistik

lainnya. Termasuk juga dalam ekspor adalah pembelian langsung atas barang dan jasa di wilayah domestik oleh penduduk negara lain. Sebaliknya pembelian langsung barang dan jasa di luar negeri oleh penduduk Indonesia, dimasukkan sebagai impor. Data yang digunakan diperoleh dari beberapa sumber yaitu Statistik Ekspor dan Impor, BPS; Neraca Pembayaran baik dari Bank Indonesia maupun Dana Moneter Internasional; serta data dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ekspor barang dinilai menurut harga *free on board (fob)*, sedangkan impor menurut *cost insurance freight (cif)*. Kurs dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah dibedakan untuk ekspor dan impor. Untuk ekspor digunakan rata-rata kurs beli dolar AS (dari Bank Indonesia) yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi ekspor bulanan, sedangkan untuk impor digunakan rata-rata kurs jual dolar AS oleh bank, yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi impor bulanan. Sumber data yang digunakan untuk estimasi nilai ekspor dan impor barang adalah publikasi tahunan BPS, sedangkan untuk ekspor dan impor jasa diperoleh dari neraca pembayaran yang dipublikasi oleh Bank Indonesia.

Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri atas Faktor Produksi

Pendapatan neto di sini hanya mencakup pendapatan atas modal dan bunga neto yang diturunkan dari Neraca Pembayaran Indonesia yang berasal dari Bank Indonesia. Pendapatan neto yang dimaksud di sini adalah selisih antara pendapatan yang mengalir masuk dari luar negeri dengan pendapatan yang mengalir ke luar negeri. Data asal yang ada pada neraca pembayaran disajikan dalam nilai dolar AS. Data pendapatan yang mengalir masuk dan keluar telah dikonversikan dari nilai dolar AS masing-masing dengan menggunakan kurs ekspor dan impor rata-rata tertimbang.

Perkiraan atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara deflasi, menggunakan *indeks harga per unit impor* dan *ekspor* masing-masing sebagai *deflator*-nya.

Pajak Tidak Langsung Neto dan Penyusutan

Pajak tidak langsung neto mencakup pajak tidak langsung yang diterima pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikurangi dengan subsidi bahan bakar minyak dan pupuk. Data pajak tidak langsung dan subsidi tersebut bersumber pada realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat dan daerah yang diperoleh baik dari Departemen Keuangan maupun BPS. Selanjutnya, besarnya

penyusutan diperkirakan dengan menggunakan persentase terhadap PDB yang diturunkan dari Tabel Input Output Indonesia 2000.

Perkiraan atas dasar harga konstan 2000, untuk pajak tidak langsung neto dihitung dengan cara deflasi menggunakan *indeks harga implisit PDB*, sedangkan untuk penyusutan menggunakan persentase yang sama terhadap PDB atas dasar harga konstan.

PDB atas dasar harga berlaku (*at current market prices*) atau **nominal**, PDB yang dinilai atas dasar harga berlaku pada tahun-tahun bersangkutan.

PNB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara.

PDB harga konstan (riil) merupakan PDB atas dasar harga berlaku, namun tingkat perubahan harganya telah “dikeluarkan”. Peningkatan besarnya nilai PDB ini dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor.

Distribusi PDB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara.

Distribusi PDB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.

PDB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.

PDB dan PNB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai rata-rata PDB dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai ini belum memperhatikan kesenjangan antar satu/keompok orang dengan kelompok lainnya.

PDB dan PNB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Penjelasan Teknis Statistik

Pertumbuhan ekonomi triwulan ke triwulan (*q to q*)

PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi tahun ke tahun (*y on y*)

PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dalam tahun tertentu dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi *c to c*

PDB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan suatu triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya.

Sumber pertumbuhan (*source of growth*) menunjukkan sektor atau komponen pengeluaran dalam PDB yang menjadi penggerak pertumbuhan. Untuk memperoleh sumber-sumber pertumbuhan, laju pertumbuhan ekonomi ditimbang dengan masing-masing *share* sektor atau komponen pengeluaran terhadap PDB.

1.3 Penilaian Harga Konstan PDB

Dalam kasus-kasus data harga tahun-tahun bersangkutan tidak tersedia, dilakukan estimasi dengan melihat berbagai indeks harga yang bersesuaian. Seperti telah dijelaskan, terdapat 2 (dua) penilaian harga: harga berlaku dan harga konstan. Untuk memperoleh penilaian harga berlaku cukup mudah, karena hanya mengikuti harga yang ada. Namun demikian, ketika data diperlukan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, diperlukan penilaian atas dasar harga konstan. Terdapat tiga metode yang digunakan memperoleh penilaian harga atas dasar harga konstan, yaitu:

- a. **Revaluasi** yaitu perkalian kuantum produksi tahun yang berjalan dengan harga tahun dasar tertentu (tahun 2000) untuk memperoleh PDB atas dasar harga konstan.
- b. **Ekstrapolasi** yaitu dengan cara mengalikan nilai tahun dasar tertentu dengan suatu indeks kuantum tahun-tahun setelahnya dibagi 100.
- c. **Deflasi** yaitu dengan cara membagi nilai atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks harga yang bersesuaian dibagi 100.

1.4 Publikasi dan Ketersediaan Data

Publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik meliputi PDB untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sampai saat ini publikasi yang tersedia meliputi:

- a. Penyampaian Berita Resmi Statistik mengenai PDB dan PDRB serentak di seluruh Indonesia setiap satu setengah bulan setelah berakhirnya triwulan berjalan. (Misal triwulan I (Januari-Maret) akan diumumkan tanggal 15 Mei tahun berjalan)
- b. Pendapatan Nasional Indonesia Tahun 2003-2006
- c. Pendapatan Nasional Triwulan Indonesia Tahun 2003-2006
- d. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2002-2006 (menurut Lapangan Usaha)
- e. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2002-2006 (menurut Penggunaan)
- f. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2002-2006

2. INFLASI

Inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Barang dan jasa tersebut jumlahnya sangat banyak, namun “keranjang” barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung konsumsi rumah tangga seluruhnya berjumlah 774 komoditas. Jumlah komoditas tersebut bervariasi antarkota, yang terkecil terdapat di Kota Tarakan sebanyak 284 komoditas, sedangkan yang terbanyak terdapat di DKI Jakarta (441 komoditas), secara rata-rata sebanyak 335 komoditas (dari 66 kota). Angka tersebut merupakan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2007 yang merupakan patokan untuk menyusun inflasi.

Inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan menggunakan rumus Laspeyres yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres*). Rumus tersebut mengacu pada manual Organisasi Buruh Dunia (*International Labour Organisation/ILO*). Pengelompokan IHK didasarkan pada klasifikasi internasional baku yang tertuang dalam *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) yang diadaptasi untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Penjelasan Teknis Statistik

Inflasi IHK atau inflasi umum (*headline inflation*) adalah inflasi seluruh barang/jasa yang dimonitor harganya secara periodik. Inflasi umum adalah komposit dari inflasi inti, inflasi *administered prices*, dan inflasi *volatile goods*.

Secara umum penghitungan inflasi dari IHK mengikuti rumus berikut ini.

$$INF_t = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$$

t = bulan atau tahun tertentu

Contoh:

IHK Umum bulan Juli 2008 sebesar 111,59 sedangkan IHK Umum bulan Juni 2008 sebesar 110,08 maka besarnya angka inflasi IHK Umum bulan Juli 2008 adalah $[(111,59 - 110,08) / 110,08] \times 100\% = 1,37\%$.

Inflasi inti (*core inflation*) adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum, seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran, yang sifatnya cenderung permanen, *persistent*, dan bersifat umum. Berdasar SBH 2002 jumlah komoditasnya sebanyak 670 antara lain beras, kontrak rumah, upah buruh, mie, susu, mobil, sepeda motor, dan sebagainya.

Contoh:

IHK Komponen inti (*core*) bulan Mei 2008 sebesar 150,59 sedangkan IHK Komponen inti (*core*) bulan April 2008 sebesar 149,46 maka besarnya angka inflasi IHK Komponen inti (*core*) bulan Mei 2008 adalah $[(150,59 - 149,46) / 149,46] \times 100\% = 0,76\%$.

Inflasi *administered prices* adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya secara umum dapat diatur pemerintah. Berdasar SBH 2007 jumlah komoditasnya sebanyak 19 antara lain bensin, tarif listrik, rokok, dan sebagainya.

Contoh:

IHK Komponen *administered prices* bulan Mei 2008 sebesar 197,09 sedangkan IHK Komponen *administered prices* bulan April 2008 sebesar 191,64 maka besarnya angka inflasi IHK Komponen *administered prices* bulan Mei 2008 adalah $[(197,09 - 191,64) / 191,64] \times 100\% = 2,84\%$.

Inflasi *volatile goods* adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Berdasarkan tahun dasar 2007, inflasi *volatile goods* masih didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai inflasi *volatile foods*. Jumlah komoditasnya sebanyak 55 antara lain beras, minyak goreng, cabe, daging ayam ras, dan sebagainya.

Contoh:

IHK Komponen *volatile goods* bulan Mei 2008 sebesar 176,38 sedangkan IHK Komponen *volatile goods* bulan April 2008 sebesar 173,38 maka besarnya angka inflasi IHK Komponen *volatile goods* bulan Mei 2008 adalah $[(176,38 - 173,38) / 173,38] \times 100\% = 1,73\%$.

Paket komoditas adalah “sekeranjang” barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat di suatu kota yang diukur IHK-nya.

Diagram timbang adalah diagram yang menunjukkan persentase nilai konsumsi tiap jenis barang/jasa terhadap total rata-rata pengeluaran rumah tangga di suatu kota.

Bahan dasar penyusunan inflasi adalah hasil Survei Biaya Hidup (SBH) (*Cost of Living Survey*). SBH diadakan antara 5-10 tahun sekali, dan kini SBH 2007 menjadi dasar penyusunan IHK. Sekitar 100 ribu rumah tangga di Indonesia ditanya mengenai tingkat pengeluaran serta jenis dan nilai barang/jasa apa saja yang dikonsumsi selama setahun penuh.

Secara nasional paket komoditas yang diperoleh dari hasil SBH 2007 menunjukkan bobot komoditas makanan turun dari 43,38 persen menjadi 36,12 persen. Selain dari paket komoditas, hasil SBH lainnya yang digunakan untuk menghitung inflasi adalah Diagram Timbang (*Weighting Diagram*).

Rumus IHK (modifikasi Laspeyres):

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^k P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

Penjelasan Teknis Statistik

dengan:

- I_n = Indeks periode ke-n
- P_{ni} = Harga jenis barang i, periode ke-n
- $P_{(n-1)i}$ = Harga jenis barang i, periode ke-(n-1)
- $P_{(n-1)i} Q_{0i}$ = Nilai konsumsi jenis barang i, periode ke-(n-1)
- $P_{0i} Q_{0i}$ = Nilai konsumsi jenis barang i pada tahun dasar
- k = Jumlah jenis barang paket komoditas

Rumus Inflasi:

a. Untuk bulanan

$$\frac{\text{IHK bulan (n)} - \text{IHK bulan (n-1)}}{\text{IHK bulan (n-1)}} \times 100$$

b. Untuk Tahunan

$$\frac{\text{IHK bulan n tahun (t)} - \text{IHK bulan n tahun (t-1)}}{\text{IHK bulan n tahun (t-1)}} \times 100\%$$

c. Penyusunan IHK Nasional

$$\text{IHK}_{\text{NAS}} = \text{IHK}_{\text{KOTA}} \times \text{PENIMBANG}_{\text{KOTA}}$$

Pengumpulan data harga menggunakan daftar pertanyaan dan pencacahannya dibedakan sesuai waktunya: mingguan, 2 (dua) mingguan dan bulanan. Data harga diperoleh dari responden melalui wawancara dan *scan barcode*.

Contoh Penghitungan Angka Inflasi:

a. Inflasi Tahunan

Inflasi dihitung secara titik per titik (*point-to-point*) dalam skala bulanan maupun tahunan. Angka-angka di dalam Tabel 3.1 digunakan dalam formula yang telah diberikan.. Misalnya angka $\text{IHK}_{\text{Des 2007}}$ sebesar 155,50 diperoleh dari Tabel 3.1, kolom (4), baris Desember, sedangkan angka $\text{IHK}_{\text{Des 2006}}$ diperoleh dari tabel dan baris yang sama tetapi kolom (3) yakni sebesar 145,89. Selanjutnya dengan memasukkan angka-angka yang bersesuaian dengan formula di bawah

dan dengan sedikit penghitungan diperoleh angka inflasi tahun 2007 sebesar 6,59%.

$$\begin{aligned}\text{Inflasi Tahun 2007} &= \frac{\text{IHK}_{\text{Des 2007}} - \text{IHK}_{\text{Des 2006}}}{\text{IHK}_{\text{Des 2006}}} \times 100\% \\ &= \frac{155,50 - 145,89}{145,89} \times 100\% \\ &= 6,59\%\end{aligned}$$

b. Inflasi Tahunan Kumulatif (Metode sebelum April 1998)

Angka inflasi tahunan kumulatif dihitung dengan cara menjumlahkan angka inflasi masing-masing bulan, mulai Januari sampai dengan Desember pada tahun yang bersangkutan. Secara formula dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Inflasi Tahun } t = I_{\text{Jan } t} + I_{\text{Feb } t} + \dots + I_{\text{Des } t}$$

$$\begin{aligned}\text{Inflasi Tahun 2007} &= I_{\text{Jan 2007}} + I_{\text{Feb 2007}} + \dots + I_{\text{Des 2007}} \\ &= 1,04\% + 0,62\% + \dots + 1,10\% \\ &= 6,41\%\end{aligned}$$

Angka-angka di atas diperoleh dari Tabel 3.1, kolom (4), baris Januari (1,04%), Februari (0,62%) sampai dengan Desember (1,10%). Perlu ditambahkan bahwa angka inflasi yang dihitung berdasarkan formula *point to point* hasilnya tidak sama dengan angka inflasi yang dihitung berdasarkan formula kumulatif. BPS dalam penghitungan inflasinya menggunakan formula *point to point*. Jadi untuk contoh tahun 2007, angka inflasi sebesar 6,59% bukan 6,41%.

c. Inflasi Triwulanan *Point to Point* :

$$\begin{aligned}\text{Triwulan I Tahun 2008} &= \frac{\text{IHK}_{\text{Mar 2008}} - \text{IHK}_{\text{Des 2007}}}{\text{IHK}_{\text{Des 2007}}} \times 100\% \\ &= \frac{160,81 - 155,50}{155,50} \times 100\% \\ &= 3,41 \%\end{aligned}$$

Penjelasan Teknis Statistik

d. Inflasi Triwulanan Kumulatif:

$$\begin{aligned}\text{Triwulan I Tahun 2008} &= I_{\text{Jan}2008} + I_{\text{Feb}2008} + I_{\text{Maret}2008} \\ &= 1,77\% + 0,65\% + 0,95\% \\ &= 3,37\%\end{aligned}$$

Penyajian dan Akses Data

Data inflasi disajikan dalam 7 (tujuh) kelompok pengeluaran, yaitu: Bahan Makanan; Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau; Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar; Sandang; Kesehatan; Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga; Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan.

Data inflasi disajikan juga dalam tiga kelompok perubahan harga, yaitu inflasi komoditas yang harganya bergejolak (*volatile good inflation*), inflasi komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered price inflation*), dan inflasi inti (*core inflation*).

Data inflasi biasanya disajikan menurut 45 kota, namun sejak bulan Juli 2008 disajikan menurut kota (66 kota) dan nasional (gabungan 66 kota). Data inflasi disajikan dalam waktu bulanan dan dapat diakses melalui Publikasi, CD/ Disket, Website BPS (<http://www.bps.go.id>), Perpustakaan/Toko Buku BPS, dan *Subject Matter* terkait.

3. EKSPOR-IMPOR BARANG

BPS dengan memanfaatkan dokumen pemberitahuan ekspor/impor barang yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC), dilakukan pengolahan dan penyajian data statistik ekspor dan impor barang di Indonesia, dan hasilnya disajikan dalam Statistik Ekspor-Impor Barang.

Penyajian data ekspor-impor mencakup volume maupun nilai, menurut komoditi (satu jenis barang, kelompok barang); negara tujuan/asal, dan pelabuhan muat/bongkar barang di suatu provinsi.

Data ini berguna bagi pemerintah, swasta dan perorangan. Bagi pemerintah, data tersebut dapat membantu proses perumusan kebijakan maupun untuk memantau kinerja perekonomian. Di samping itu, data tersebut dipakai pula untuk menyusun Produk Domestik Bruto (PDB) dan Neraca Pembayaran (BOP). Bagi swasta dan perorangan, statistik ekspor-impor dapat dipakai untuk berbagai analisis ekonomi dan sosial.

Pencatatan data ekspor-impor oleh BPS sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), *United Nations Statistical Division (UNSD)*. Sesuai rekomendasi tersebut, BPS mengambil wilayah pabean (*the custom frontier*) sebagai wilayah statistik. Wilayah ini dipilih karena sumber datanya berupa dokumen ekspor-impor yang harus melalui penyelesaian pabean (*customs declaration*). Metode pengumpulan data tersebut juga dilakukan oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara ASEAN, kecuali Kamboja yang pengumpulan data statistik ekspor-impornya dilakukan melalui survei ke perusahaan eksportir (pelaku ekspor) dan importir (pelaku impor).

Konsep dan definisi yang dipakai dalam pencatatan ekspor-impor barang yang dilakukan oleh BPS berdasarkan konsep dan definisi dalam *International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions* (series M no. 52 Revisi 2) yang diterbitkan oleh *United Nations* tahun 1998. Sebagai anggota *United Nations Statistical Office* dan berdasarkan konvensi internasional maka BPS harus mengikuti/memakai konsep dan definisi tersebut. Dengan demikian data yang dihasilkan oleh BPS bisa dipakai untuk perbandingan internasional.

Berdasarkan konsep dan definisi *International Merchandise Trade Statistics* beberapa hal dapat diberikan di sini.

- a. Ekspor barang adalah seluruh barang yang dibawa ke luar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun non-komersial (seperti barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri yang hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut. Tidak

Penjelasan Teknis Statistik

termasuk dalam statistik ekspor adalah: (1) Pakaian, barang pribadi dan perhiasan milik penumpang yang bepergian ke luar negeri; (2) Barang-barang yang dikirim untuk perwakilan suatu negara di luar negeri; (3) Barang untuk eksepsi/pameran; (4) Peti kemas untuk diisi kembali; (5) Uang dan surat-surat berharga; (6) Barang-barang untuk contoh (*sample*).

- b. Impor barang adalah seluruh barang yang masuk ke wilayah suatu negara baik bersifat komersial maupun bukan komersial, serta barang yang akan diolah di dalam negeri yang hasilnya dikeluarkan lagi dari negara tersebut. Tidak termasuk dalam statistik impor adalah: (1) Pakaian dan barang-barang perhiasan penumpang; Barang-barang penumpang untuk dipakai sendiri, kecuali lemari es, pesawat TV dan sebagainya; (2) Barang-barang yang dikirim untuk keperluan perwakilan (kedutaan) suatu negara; (3) Barang-barang untuk ekspedisi/penelitian ilmiah dan eksepsi/pameran; (4) Pembungkus/peti kemas; (5) Uang dan surat-surat berharga; (6) Barang-barang sebagai contoh (sampel).

Sebagian impor kapal laut dan pesawat beserta suku cadangnya termasuk dalam statistik impor. Barang-barang luar negeri yang diolah atau diperbaiki di dalam negeri tetap dicatat sebagai barang impor, meskipun setelah barang tersebut selesai diproses akan kembali ke luar negeri (*re-import*).

Statistik ekspor-impor di Indonesia diperoleh dari administrasi kepabeanan. Semua barang yang masuk atau ke luar dari batas-batas kepabeanan (*customs area*) Indonesia harus dicatat oleh Pabean dalam hal ini Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Informasi yang dicatat antara lain tujuan/asal dan jenis barang (komoditi) tersebut.

- a. Statistik ekspor disusun dari dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diisi oleh eksportir. Periode penentuan ekspor adalah tanggal diberikannya izin muat barang tersebut (*custom declaration*) yang diberikan oleh KPBC.

Sistem pencatatan Statistik Ekspor barang memberlakukan sistem Perdagangan Umum (*general trade system*). Di mana semua barang yang ke luar dari wilayah Indonesia dicatat sebagai ekspor. Dengan demikian barang-barang yang keluar dari kawasan khusus (seperti Kawasan Berikat) juga dimasukkan sebagai barang ekspor.

Metode pencatatan nilai ekspor adalah pada harga FOB (Free on Board)

yaitu harga barang sampai dimuat di kapal.

- b. Sampai dengan tahun 2007 sistem pencatatan Statistik Impor masih menggunakan sistem perdagangan khusus (*special trade system*). Dalam sistem ini, wilayah Kawasan Berikat dianggap sebagai Luar Negeri, sehingga barang impor yang masuk ke Kawasan Berikat tidak dicatat sebagai impor. Sejak Januari 2008 barang impor yang masuk ke Kawasan Berikat dicatat sebagai impor sehingga pencatatan statistik impor menggunakan sistem Perdagangan Umum (*general trade system*). Pencatatan dilakukan berdasarkan hasil pengolahan dokumen kepabeanan, yaitu dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diisi oleh importir dan sudah mendapat legalisasi/persetujuan bongkar barang dari KPBC setempat. Nilai impor dicatat dalam harga CIF (*Cost, Insurance and Freight*).

Komoditi (barang) ekspor-impor diklasifikasikan menurut klasifikasi komoditas internasional yaitu *International Commodity Description and Coding System—Harmonized System (HS)* yang dibuat oleh Organisasi Bea dan Cukai Dunia (*World Customs Organization/WCO*) dan *Standards International Trade Classification (SITC)* Revisi 3. Komisi Statistik PBB (*UN Statistical Commission*) menyarankan kepada negara-negara di dunia untuk menggunakan klasifikasi HS dalam penyajian data statistik perdagangan internasional.

Kode HS yang digunakan saat ini terdiri dari 10 digit, yaitu 6 digit pertama merupakan standar internasional, 2 digit selanjutnya merupakan standar ASEAN, dan 2 digit terakhir hanya berlaku untuk negara bersangkutan. Kode HS yang dipakai sekarang berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) Tahun 2007, sementara itu untuk kode negara berdasarkan *United Nation Country Codes*.

Penyajian dan penyebarluasan statistik ekspor-impor diumumkan oleh BPS pada hari kerja pertama setiap bulan melalui *press-release* bersamaan dengan pengumuman data strategis lainnya.

Data bulanan dan tahunan baik secara agregasi maupun rinci per komoditi tersedia bagi publik dalam bentuk *hard copy* (buku) dan *soft copy* (disket, CD dsb). Di samping itu, publik juga dapat mengakses data pada website BPS dengan alamat: <http://www.bps.go.id>. Pada website tersebut tersaji data ekspor-impor dalam bentuk statis dan dinamis. Dalam bentuk statis, data tersedia dalam bentuk tabel-tabel statis yang tidak bisa diubah. Sementara dalam bentuk dinamis, pengguna data dapat *men-download* data ekspor-impor sesuai dengan komoditi yang diperlukan.

3.1 Statistik ekspor-impor yang dapat disajikan dan bersifat substantif antara lain:

- a. Impor menurut Komoditi (HS 1, 2, dan 10 digit; SITC 1, 2 dan 3 digit ; Impor menurut Penggunaan Barang /Broad Economic Categories)
- b. Ekspor/Impor menurut Negara Tujuan/Asal
- c. Ekspor/Impor menurut Pelabuhan Muat/Bongkar
- d. Ekspor/Impor menurut Komoditi dan Negara Tujuan/Asal
- e. Ekspor/Impor menurut Komoditi dan Pelabuhan Muat/Bongkar
- f. Ekspor/Impor menurut Negara Tujuan/Asal dan Komoditi
- g. Ekspor/Impor menurut Provinsi dan Komoditi

3.2 Penyajian data dikategorikan dalam 3 (tiga) status yaitu:

- a. Angka Sangat Sementara ekspor-impor dirilis sekitar 1 (satu) bulan setelah akhir bulan pencatatan. Sebagai contoh, data yang dicatat pada bulan Mei akan dirilis pada bulan Juli pada tahun yang sama, dan diterbitkan setiap bulan.
- b. Angka Sementara (bulanan) ekspor-impor dirilis dalam waktu sekitar 2 (dua) bulan setelah akhir bulan pencatatan. Sebagai contoh, data yang dicatat pada bulan Mei akan dirilis pada awal bulan Agustus tahun yang sama.
- c. Angka Tetap akan disajikan 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan pencatatan. Sebagai contoh angka tetap ekspor-impor akan dirilis pada bulan September tahun yang sama.

Sedangkan data ekspor-impor tahunan dapat diperoleh dalam waktu 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pencatatan. Sebagai contoh, angka ekspor tahun 2007 dapat diperoleh pada bulan April 2008.

4. KEMISKINAN

Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun nonmakanan yang bersifat mendasar.

Penduduk miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK), terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM).

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis kemiskinan makanan

Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.

Garis kemiskinan nonmakanan (GKNM)

Garis kemiskinan nonmakanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

4.1 Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara, yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

Penjelasan Teknis Statistik

dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM).

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori.

Garis kemiskinan nonmakanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi nonmakanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok nonmakanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi nonmakanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi.

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Nonmakanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

4.2 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan.

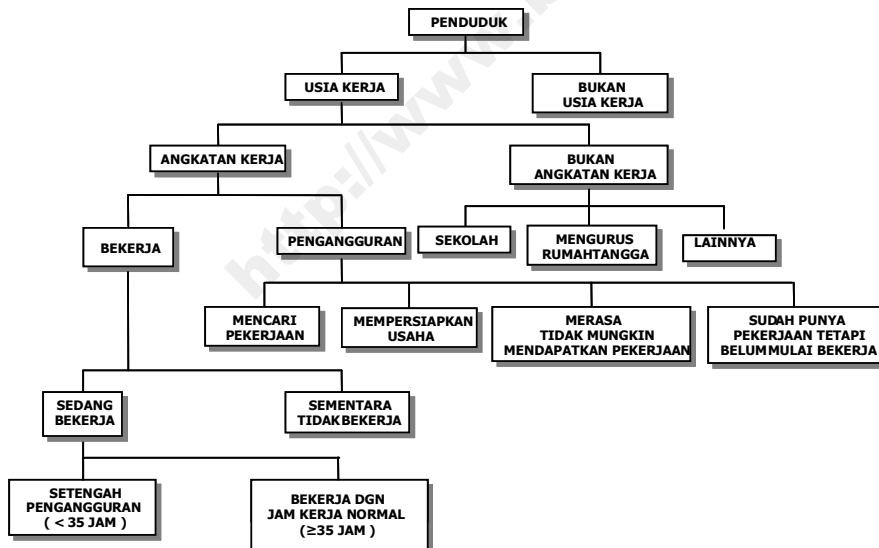
- a. *Pertama, Head Count Index (HCI-P0)*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- b. *Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)* yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- c. *Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)* yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

5. KETENAGAKERJAAN

Konsep/definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization* (ILO) sebagaimana tercantum dalam buku **“Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment” An ILO Manual on Concepts and Methods, ILO 1992.**

Hal ini dimaksudkan terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia. Menurut Konsep *Labor Force Framework*, penduduk dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok-kelompok tersebut dapat digambarkan dalam Diagram Ketenagakerjaan sebagai berikut.

Diagram Ketenagakerjaan



Penduduk

Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Usia kerja

Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja.

Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Beberapa contoh:

- Batas bawah: Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun).
- Batas atas: Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, Mexico (65 tahun), banyak negara seperti Indonesia tidak ada batas atas.

Angkatan Kerja

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Bekerja

Kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit dan sejenisnya.

Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rusia, dan lainnya.

Pengangguran

Definisi baku untuk Penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian/perluasan menjadi sebagai berikut:

Penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (*open unemployment*).

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- a. mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan,
- b. mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha,
- c. mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- d. mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Aktivitas/kegiatan ekonomi

Aktivitas/kegiatan ekonomi yang digunakan merujuk pada *the United Nations System of National Accounts* (SNA). Penduduk usia kerja dikategorikan sebagai bekerja/mempunyai pekerjaan jika yang bersangkutan bekerja (meskipun hanya bekerja satu jam dalam periode referensi) atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja.

Sejalan dengan *the labour force framework*, definisi internasional untuk bekerja didasarkan pada periode referensi yang pendek (satu minggu atau satu hari); *a snapshot picture of the employment situation at a given time*.

Setengah Penganggur

Penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal (dalam hal ini 35 jam seminggu, tidak termasuk yang sementara tidak bekerja) dikategorikan sebagai setengah penganggur.

Penjelasan Teknis Statistik

Setengah Penganggur Terpaksa

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

Setengah Penganggur Sukarela

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).

Jumlah Jam Kerja

Jumlah jam kerja seluruhnya yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

Lapangan Usaha

Bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005. Dalam pengumpulan datanya menggunakan 18 kategori tetapi dalam penyajian/publikasinya menggunakan 9 kategori/sektor yaitu:

1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air
5. Bangunan
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi
8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan
9. Jasa kemasyarakatan

Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/ kegiatan. Status Pekerjaan terbagi menjadi:

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
4. Buruh/Karyawan/Pegawai
5. Pekerja bebas di pertanian

6. Pekerja bebas di nonpertanian
7. Pekerja keluarga/tak dibayar

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Cara penghitungan TPAK adalah:

$$\text{Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai *persentase jumlah penganggur* terhadap *jumlah angkatan kerja*. Cara penghitungan TPT adalah:

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)} = \frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Data Ketenagakerjaan diperoleh melalui kegiatan survei Sakernas

Variabel substantif yang dikumpulkan

- Identitas individu (nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, dan pendidikan).
- Kegiatan Seminggu Yang Lalu (bekerja, penganggur, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya).
- Pekerjaan Utama (lapangan usaha/pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, jam kerja, pendapatan/upah/gaji bersih).
- Pekerjaan Tambahan (lapangan usaha/pekerjaan).
- Kegiatan Mencari Pekerjaan/Mempersiapkan Usaha.
- Pengalaman Kerja.

Kemampuan Penyajian

Berdasarkan metodologi dan variabel substantif, maka hasil Sakernas dapat disajikan menurut:

- Provinsi (kab/kota untuk Sakernas Agustus)
- Daerah Perkotaan/Perdesaan
- Jenis Kelamin

Penjelasan Teknis Statistik

- Umur
- Pendidikan
- Lapangan Usaha/Pekerjaan
- Jenis Pekerjaan
- Status Pekerjaan
- Jam Kerja

Periode referensi

Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya.

Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah *satu hari* atau *satu minggu*. Periode referensi satu minggu (yang lalu) paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

The one-hour criterion

Kriteria satu jam digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work* dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya.

Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan pengangguran yang digunakan, di mana pengangguran adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*) sehingga jika batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan maka akan mengubah definisi pengangguran yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan terutama ketika dilakukan *joint analysis* antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai *employed* (bekerja).

BPS menggunakan konsep/definisi "*bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu*" untuk mengkategorikan seseorang (*currently economically*

active population) sebagai *bekerja*, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

7. ANGKA PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA

Tata cara pengumpulan, pengolahan dan penghitungan produksi padi dan palawija yang digunakan saat ini secara nasional mengacu pada Buku Pedoman Pengumpulan dan Pengolahan Data Tanaman Pangan yang telah disempurnakan oleh Badan Pusat Statistik dan Departemen Pertanian Tahun 2007.

Blok Sensus

Blok sensus adalah satuan wilayah kerja petugas pencacah yang merupakan bagian dari suatu desa/kelurahan, mencakup sekitar 80-120 rumah tangga dan dibatasi oleh batas-batas alam atau batas-batas lainnya yang jelas seperti sungai, tanggul, pantai, rel kereta api dan sebagainya.

Alat Ubinan

Alat Ubinan adalah alat yang digunakan dalam pengukuran produktivitas tanaman padi/palawija (Survei Ubinan), berupa batang dari bahan *stainless steel* berukuran $2\frac{1}{2}$ mx $2\frac{1}{2}$ m. Tanaman padi/palawija yang berada di dalam plot alat ubinan tersebut dipanen, dibersihkan dan selanjutnya ditimbang.

Luas Panen

Luas Panen adalah luas tanaman padi/palawija yang dipanen pada suatu wilayah (kecamatan) dalam periode pengumpulan data (bulanan), dan merupakan luas bersih (tidak termasuk luas galengan/pematang).

Data pokok tanaman padi dan palawija yang dikumpulkan adalah luas panen dan produktivitas (hasil per hektar) yang selanjutnya digunakan untuk penghitungan produksi. Produksi padi atau palawija merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas (hasil/hektar). Data pendukung lainnya yang juga dikumpulkan antara lain adalah luas puso/rusak, luas tanam dan luas baku lahan sawah.

Pengumpulan Data Luas Tanam/Panen

Pengumpulan data luas panen dilakukan setiap bulan oleh Mantri Pertanian/Kepala Cabang Dinas Kecamatan (KCD) melalui Survei Pertanian (SP). Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan area kecamatan di seluruh

Penjelasan Teknis Statistik

wilayah Indonesia. Pengumpulan data luas panen di tingkat kecamatan tersebut didasarkan pada hasil pengumpulan data dari seluruh desa/kelurahan di kecamatan bersangkutan.

Pengumpulan data luas tanam/panen pada tingkat desa/kelurahan didasarkan pada:

a. Sistem blok pengairan.

Untuk yang berpengairan teknis, biasanya sawah dalam desa/kelurahan dibagi dalam blok-blok pengairan, kemudian tanggal penanaman ditentukan untuk setiap blok pengairan, sehingga luas tanaman dapat diperkirakan dari volume air yang disalurkan.

b. Laporan petani kepada Kepala Desa/Lurah.

Luas tanaman didasarkan atas catatan di desa/kelurahan yang berasal dari laporan petani dan atau kelompok tani/kontak tani.

c. Banyaknya bibit/benih yang digunakan.

Berdasarkan banyaknya bibit/benih yang digunakan dalam satu desa/kelurahan, petugas dapat menaksir luas tanaman.

d. Eye estimate (pandangan mata).

Penaksiran dengan pandangan mata berdasarkan luas baku lahan dilakukan oleh petugas desa/kelurahan yang sudah berpengalaman di wilayah tugasnya.

e. Sumber informasi lainnya.

Sumber informasi lain yang dapat digunakan sebagai dasar atau rujukan dalam memperoleh data luas adalah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Petugas Pengawas Benih, dan lain-lain.

Pengumpulan Data Produktivitas

Pengumpulan data produktivitas (hasil per hektar) tanaman padi dan palawija dilakukan melalui Survei Ubinan. Periode pengumpulan data dilakukan setiap *subround* (caturwulan/empat bulanan) dengan petugas lapangan adalah Mantri Statistik/Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan KCD.

Metode pengambilan sampel Survei Ubinan dilakukan dalam dua tahap (*two stage sampling*), sebagai berikut:

a. Tahap I,

Memilih sejumlah Blok Sensus secara pps (*proportional probability to size*) dengan *size* banyaknya rumah tangga padi/palawija. Pada Blok Sensus terpilih kemudian dilakukan pendaftaran (*listing*) rumah tangga untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kegiatan penanaman padi dan palawija.

b. Tahap II,

Berdasarkan hasil *listing* rumah tangga pada tahap I, dipilih sejumlah petak yang akan dipanen pada *subround* tertentu. Pada petak terpilih, kemudian dilakukan pemanenan pada plot pengamatan/plot ubinan berukuran 2½ m x 2½ m.

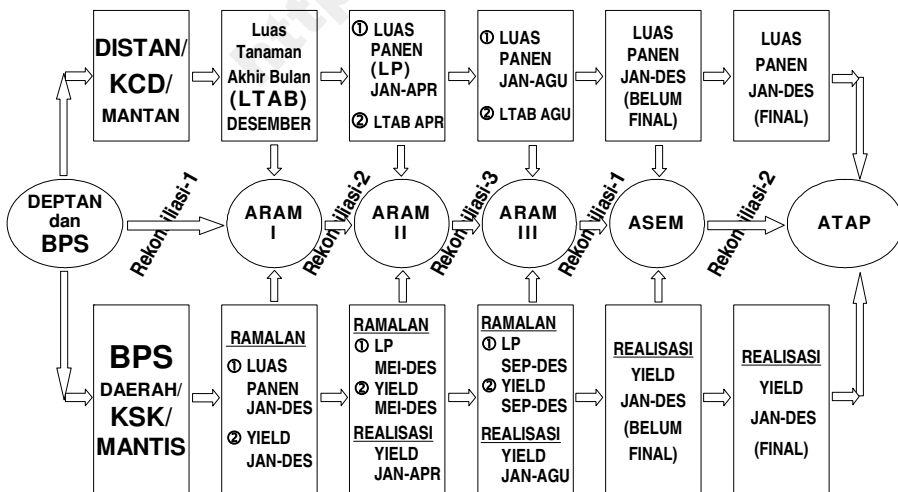
Penghitungan Produksi

Penghitungan produksi padi dan palawija dilakukan oleh BPS Provinsi menurut *subround* (SR) sesuai dengan periode pengumpulan datanya. Produksi merupakan hasil perkalian antara luas panen dan produktivitas (hasil per hektar).

- a. Produksi SR-1 (Januari-April) = Luas Panen SR-1 x Produktivitas SR-1
- b. Produksi SR-2 (Mei-Agustus) = Luas Panen SR-2 x Produktivitas SR-2
- c. Produksi SR-3 (September-Des.) = Luas Panen SR-3 x Produktivitas SR-3
- d. Produksi Januari–Desember = Produksi (SR-1 + SR-2 + SR-3)
- e. Luas Panen Januari–Desember = Luas Panen (SR-1 + SR-2 + SR-3)
- f. Produktivitas Januari–Desember = Produksi Januari–Desember dibagi Luas Panen Januari–Desember.

Angka Ramalan Produksi

Mekanisme penghitungan angka ramalan produksi padi dan palawija secara garis besar adalah seperti gambar berikut:



Penjelasan Teknis Statistik

Data/angka yang diperkirakan/diramalkan adalah data luas panen dan produktivitas per provinsi dan per *subround*. Series data yang digunakan untuk bahan peramalan sekitar 20 tahun.

a. Ramalan Luas Panen

Model yang digunakan untuk peramalan luas panen per *subround* (Januari-April, Mei-Agustus dan September-Desember) adalah dengan persamaan regresi linier, logaritma, atau eksponensial tergantung pola datanya. Peramalan luas panen suatu *subround* didasarkan pada Luas Tanaman Akhir Bulan (LTAB) di *subround* sebelumnya. LTAB April pada Ramalan I, serta LTAB Agustus pada Ramalan II, juga masih merupakan ramalan.

b. Luas Tanaman Akhir Bulan (LTAB)

Model yang digunakan untuk peramalan luas tanaman akhir bulan April dan Agustus adalah dengan persamaan trend linier atau *smoothing* eksponensial, tergantung pola datanya.

c. Ramalan Produktivitas

Model yang digunakan untuk peramalan produktivitas Januari-April, Mei-Agustus dan September-Desember adalah dengan persamaan *trend linear* atau *smoothing* eksponensial, tergantung pola datanya (sama dengan model peramalan luas tanaman akhir bulan).

Seperti disajikan pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2 terlampir, produksi padi Angka Ramalan II (AramII) tahun 2008 sebesar 59,88 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Produksi tersebut terdiri dari realisasi produksi *subround* Januari-April sebesar 27,86 juta ton (46,53 persen), ramalan/perkiraan *subround* Mei-Agustus sebesar 20,19 juta ton (33,72 persen) dan ramalan/perkiraan *subround* September-Desember sebesar 11,83 juta ton (19,75 persen). Produksi padi yang disajikan sudah mencakup produksi padi sawah dan padi ladang.

Secara nasional, penyajian data produksi padi dan palawija hanya sampai tingkat provinsi karena keterbatasan jumlah sampel Survei Ubinan. Tetapi untuk daerah yang melakukan tambahan sampel dengan anggaran Pemerintah Daerah/APBD (ubinan prakarsa), penyajian data dapat dilakukan sampai tingkat kabupaten/kota. Jumlah sampel Survei Ubinan untuk tingkat penyajian provinsi, pada tahun 2008 sebanyak 60.116 plot ubinan, yang terdiri dari ubinan padi 40.965 plot dan ubinan palawija 19.151 plot.

Sebelum data disajikan, terlebih dahulu dilakukan proses validasi (rekonsiliasi) data di tingkat provinsi dan pusat. Validasi tahap awal dilakukan di

tingkat provinsi oleh BPS provinsi dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi bersama dengan BPS Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota. Validasi data selanjutnya dilakukan di tingkat pusat oleh BPS dan Departemen Pertanian bersama dengan BPS Provinsi dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi.

Dalam satu tahun, data produksi padi dan palawija disajikan sebanyak 5 (lima) kali dengan status angka yang berbeda, yaitu:

a. Angka Ramalan I (ARAM I)

ARAM I adalah data produksi pada tahun berjalan dan seluruhnya (Januari-Desember) masih merupakan angka ramalan, disajikan pada awal bulan Maret.

b. Angka Ramalan II (ARAM II)

ARAM II adalah data produksi tahun berjalan, terdiri dari angka realisasi Januari-April dan angka ramalan Mei-Desember, disajikan pada awal bulan Juli. Setelah ARAM II disajikan, maka ARAM I yang disajikan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

c. Angka Ramalan III (ARAM III)

ARAM III adalah data produksi tahun berjalan, terdiri dari angka realisasi Januari-Agustus dan angka ramalan September-Desember, disajikan pada bulan November. Setelah Aram III disajikan, maka ARAM II yang disajikan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

d. Angka Sementara (ASEM)

ASEM adalah data produksi tahun sebelumnya dan merupakan angka realisasi Januari-Desember, disajikan pada awal bulan Maret tahun berikutnya (bersamaan dengan penyajian ARAM I). Setelah ASEM disajikan, maka ARAM III tidak digunakan lagi. Karena penghitungan ASEM dilakukan pada awal tahun (bulan Februari), kondisi pemasukan dokumen secara nasional biasanya belum mencapai 100% sehingga data yang disajikan belum final.

e. Angka Tetap (ATAP)

ATAP adalah data produksi tahun sebelumnya dan seluruhnya (Januari-Desember) merupakan angka realisasi, disajikan pada awal bulan Juli tahun berikutnya (bersamaan dengan penyajian ARAM II). Setelah ATAP disajikan, maka ASEM tidak digunakan lagi.

Angka produksi padi dan palawija menurut status angka secara skema dapat dilihat pada Gambar 8.2 berikut:

Gambar 8.2
Data Realisasi dalam ARAM I, II, III
serta ASEM dan ATAP Produksi Padi/Palawija

Status Angka	SUBROUND		
	Januari April	Mei-Agustus	September-Desember
1. ARAM I	RAMALAN		
2. ARAM II	REALISASI	RAMALAN	
3. ARAM III	REALISASI		RAMALAN
4. ASEM	REALISASI (belum final)		
5. ATAP	REALISASI (final)		

LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Tabel 1
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut
Jumlah Jam Kerja Seluruhnya 2006–2008 (dalam ribuan)

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya	2006		2007		2008
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0*)	1 998,1 (2,10)	2 440,8 (2,56)	2 602,1 (2,67)	2 349,6 (2,35)	2 581,21 (2,53)
1 - 14	4 217,0 (4,43)	4 104,9 (4,30)	6 195,2 (6,35)	5 220,5 (5,22)	6 718,42 (6,58)
15 - 24	10 973,8 (11,53)	10 643,2 (11,15)	10 948,2 (11,22)	10 981,9 (10,99)	11 087,92 (10,87)
25 - 34	14 733,8 (15,48)	14 352,6 (15,04)	13 095,6 (13,42)	14 167,8 (14,18)	12 838,09 (12,58)
(1 - 34)	29 924,6 (31,44)	29 100,7 (30,49)	30 239,0 (30,99)	30 370,2 (30,39)	30 644,44 (30,03)
35+	63 254,4 (66,46)	63 915,4 (66,96)	64 742,1 (66,35)	67 210,5 (67,26)	68 824,20 (67,44)
Total	95 177,1 (100,00)	95 456,9 (100,00)	97 583,1 (100,00)	99 930,2 (100,00)	102 049,86 (100,00)

*) Sementara tidak bekerja

Tabel 2
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2006–2008
(dalam ribuan)

Pendidikan	2006		2007		2008
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/belum pernah sekolah	5 419,5 5,1	5 305,1 5,0	5 434,3 5,0	5 489,0 5,0	5 750,09 5,2
Belum/tidak tamat SD	12 150,0 11,4	12 565,6 11,8	11 540,0 10,7	13 451,6 12,2	13 430,66 12,0
SD	38 900,4 36,6	37 503,7 35,3	39 725,9 36,7	40 140,9 36,5	39 179,77 35,1
SLTP	21 903,5 20,6	21 102,1 19,8	22 434,9 20,7	21 094,4 19,2	21 562,94 19,3
SLTA Umum	14 802,5 13,9	15 770,6 14,8	15 376,9 14,2	15 279,2 13,9	16 104,22 14,4
SLTA Kejuruan	7 130,2 6,7	7 555,5 7,1	6 970,1 6,4	7 327,0 6,7	7 874,10 7,1
Akademi/Diploma I/II/III	2 444,5 2,3	2 784,1 2,6	2 763,4 2,6	2 994,8 2,7	3 180,47 2,9
Universitas	3 531,0 3,3	3 802,3 3,6	3 885,7 3,6	4 164,4 3,8	4 395,20 3,9
Jumlah	106 281,8 100,0	106 388,9 100,0	108 131,1 100,00	109 941,4 100,0	111 477,45 100,0

Tabel 3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, 2006–2008 (dalam persen)

Provinsi	2006		2007		2008
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	64,18	66,01	64,56	71,76	60,48
Sumatera Utara	70,15	66,90	68,15	75,75	67,44
Sumatera Barat	63,73	64,90	62,65	73,53	64,83
R i a u	56,05	59,64	56,52	70,04	62,48
J a m b i	65,40	64,26	67,70	71,92	65,06
Sumatera Selatan	71,16	69,64	70,17	76,32	69,81
Bengkulu	72,30	71,30	75,62	77,35	72,46
Lampung	69,38	67,47	68,39	75,23	70,50
Bangka Belitung	64,07	62,49	67,46	71,49	61,36
Kepulauan Riau	63,29	64,20	69,28	68,65	65,61
DKI Jakarta	62,72	64,92	61,04	72,11	65,92
Jawa Barat	61,83	61,41	60,73	67,51	61,89
Jawa Tengah	71,10	68,60	71,22	75,88	71,47
D.I. Yogyakarta	70,30	69,20	71,69	77,24	69,95
Jawa Timur	68,89	67,36	67,68	74,36	69,69
Banten	61,43	62,43	61,68	67,73	64,43
B a l i	75,56	76,33	76,34	83,18	77,47
Nusa Tenggara Barat	69,10	70,33	70,38	75,64	69,77
Nusa Tenggara Timur	77,23	74,36	75,49	80,55	73,26
Kalimantan Barat	68,52	73,71	74,80	78,69	75,06
Kalimantan Tengah	75,36	72,37	77,96	77,91	74,94
Kalimantan Selatan	68,11	70,43	68,55	78,89	69,47
Kalimantan Timur	63,28	67,27	63,46	68,54	57,64
Sulawesi Utara	61,11	59,20	65,64	67,43	63,12
Sulawesi Tengah	63,73	69,17	65,81	75,23	71,98
Sulawesi Selatan	57,17	59,08	59,74	67,09	59,43
Sulawesi Tenggara	65,21	66,61	70,77	67,44	69,96
Gorontalo	61,51	63,68	64,95	61,84	62,50
Sulawesi Barat	61,15	61,00	64,22	65,22	65,29
Maluku	59,66	60,95	61,30	63,01	63,64
Maluku Utara	70,77	72,41	69,43	67,24	66,85
Irian Jaya Barat	69,37	71,67	69,34	66,52	69,81
Papua	80,24	71,37	77,94	76,54	75,88
Jumlah	66,74	66,16	66,60	66,99	67,33

Tabel 4
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Menganggur
Menurut Provinsi, 2006–2008 (dalam ribuan)

Provinsi	2006		2007		2008
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	211,4	189,2	183,8	171,4	163,9
Sumatera Utara	847,6	632,0	600,1	571,3	566,5
Sumatera Barat	257,9	243,5	220,4	217,3	206,7
Riau	211,2	202,4	196,3	207,1	208,9
Jambi	92,8	78,3	84,7	76,1	74,2
Sumatera Selatan	408,0	310,9	352,8	314,8	292,1
Bengkulu	56,4	49,0	44,5	37,7	33,3
Lampung	335,9	307,7	285,9	269,1	230,4
Bangka Belitung	28,4	42,2	37,7	33,0	29,0
Kepulauan Riau	61,5	71,9	56,7	53,1	55,4
DKI Jakarta	590,0	490,8	542,0	552,4	504,1
Jawa Barat	2 539,3	2 561,5	2 543,2	2 386,2	2 262,4
Jawa Tengah	1 422,3	1 356,9	1 436,9	1 360,2	1 234,6
DI Yogyakarta	117,0	117,9	118,9	115,2	119,8
Jawa Timur	1 502,9	1 575,3	1 454,3	1 366,5	1 255,9
Banten	636,8	754,6	641,4	632,8	601,8
Bali	103,8	120,2	98,3	77,6	95,5
Nusa Tenggara Barat	182,5	186,3	159,7	135,3	107,8
Nusa Tenggara Timur	104,9	74,7	83,6	77,7	81,8
Kalimantan Barat	139,1	182,2	154,9	138,8	140,6
Kalimantan Tengah	53,6	67,6	55,2	52,0	51,6
Kalimantan Selatan	137,3	144,8	117,2	131,9	118,4
Kalimantan Timur	149,9	178,0	161,9	149,8	142,5
Sulawesi Utara	135,5	141,9	141,6	128,0	129,3
Sulawesi Tengah	93,8	119,1	77,8	99,2	88,4
Sulawesi Selatan	370,3	400,7	384,8	372,7	343,8
Sulawesi Tenggara	66,7	89,4	68,7	61,2	58,3
Gorontalo	36,8	30,0	29,5	28,0	29,8
Sulawesi Barat	19,8	27,8	18,7	25,6	27,1
Maluku	77,6	71,9	76,4	67,4	61,2
Maluku Utara	34,6	28,8	33,8	24,0	29,3
Irian Jaya Barat	33,5	31,8	31,1	28,0	32,0
Papua	77,6	52,7	55,1	49,7	51,1
Jumlah	11 104,7	10 932,0	10 547,9	10 011,1	9 427,6

Tabel 5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, 2006-2008 (dalam persen)

Provinsi	2006		2007		2008
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	12,08	10,43	10,27	9,84	9,20
Sumatera Utara	14,82	11,51	10,63	10,10	9,55
Sumatera Barat	12,93	11,87	11,02	10,31	9,73
R i a u	11,46	10,24	10,39	9,79	9,35
J a m b i	7,77	6,62	6,74	6,22	5,91
Sumatera Selatan	12,10	9,33	10,4	9,34	8,45
Bengkulu	6,91	6,04	5,12	4,68	3,98
Lampung	9,76	9,13	8,29	7,58	6,30
Bangka Belitung	5,95	8,99	7,36	6,49	5,79
Kepulauan Riau	10,69	12,24	8,86	9,01	8,49
DKI Jakarta	14,31	11,40	13,27	12,57	11,06
Jawa Barat	14,50	14,59	14,51	13,08	12,28
Jawa Tengah	8,20	8,02	8,1	7,70	7,12
D.l. Yogyakarta	6,25	6,31	6,08	6,10	6,04
Jawa Timur	7,72	8,19	7,45	6,79	6,24
Banten	16,34	18,91	16,11	15,75	14,15
B a l i	5,32	6,04	4,89	3,77	4,56
Nusa Tenggara Barat	8,96	8,90	7,55	6,48	5,20
Nusa Tenggara Timur	4,98	3,65	3,98	3,72	3,70
Kalimantan Barat	7,06	8,53	7,08	6,47	6,49
Kalimantan Tengah	5,13	6,68	5,02	5,11	4,79
Kalimantan Selatan	8,78	8,87	7,31	7,62	6,91
Kalimantan Timur	12,11	13,43	12,83	12,07	11,41
Sulawesi Utara	13,67	14,62	13,04	12,35	12,35
Sulawesi Tengah	8,90	10,31	7,01	8,39	7,25
Sulawesi Selatan	12,32	12,76	12,01	11,25	10,49
Sulawesi Tenggara	7,42	9,67	6,93	6,40	6,05
Gorontalo	9,77	7,62	7,26	7,16	7,04
Sulawesi Barat	4,64	6,45	4,09	5,45	5,68
Maluku	15,76	13,72	14,37	12,20	11,05
Maluku Utara	8,54	6,90	8,34	6,05	7,03
Papua Barat	11,17	10,17	10,18	9,46	9,30
Papua	4,50	5,83	5,52	5,01	4,85
Jumlah	10,45	10,28	9,75	9,11	8,46

Tabel 6
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan
2006-2008 (dalam ribuan)

Pendidikan	2006		2007		2008
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/belum pernah sekolah	5 185,0 5,4	5 134,5 5,4	5 288,5 5,4	5 394,7 5,4	5 670,3 5,6
Belum/tidak tamat SD	11 535,0 12,1	11 954,3 12,5	11 019,7 11,3	13 013,1 13,0	12 982,2 12,7
SD	36 225,0 38,1	34 914,0 36,6	36 972,3 37,9	37 961,2 38,0	36 963,0 36,2
SLTP	19 043,5 20,0	18 372,0 19,2	19 791,8 20,3	18 830,2 18,8	19 396,3 19,0
SLTA	17 885,7 18,8	19 169,4 20,1	18 602,0 19,1	18 535,7 18,5	20 608,4 20,2
Akademi/Diploma I/II/III	2 147,4 2,3	2 506,0 2,6	2 433,1 2,5	2 597,6 2,6	2 660,6 2,6
Universitas	3 155,4 3,3	3 406,7 3,6	3 475,8 3,6	3 597,8 3,6	3 769,0 3,7
Jumlah	95 177,1 100,0	95 456,9 100,0	97 583,1 100,0	99 930,2 100,0	102 049,9 100,0



**DAFTAR SINGKATAN
DAN AKRONIM**

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Aram	Angka ramalan
ASEAN	<i>Association of South East Asia Nation</i>
Asem	Angka sementara
Atap	Angka tetap
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BOP	<i>Balance of Payment</i>
BPS	Badan Pusat Statistik
BTBMI	Buku Tarif Bea Masuk Indonesia
c to c	<i>commulative to commulative</i>
CD	<i>Compact Disc</i>
CIF	<i>Cost Insurance Freight</i>
COICOP	<i>Classification of Individual Consumption According to Purpose</i>
CPI	<i>Consumer Price Index</i>
Deptan	Departemen Pertanian
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FOB	<i>Free on Board</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
GK	Garis Kemiskinan
GKG	Gabah Kering Giling
GKM	Garis Kemiskinan Makanan
GKNM	Garis Kemiskinan Non Makanan
GNP	<i>Gross National Product</i>
HCI	<i>Head Count Index</i>
HS	<i>Harmonized System</i>
IHK	Indeks Harga Konsumen
IHPB	Indeks Harga Perdagangan Besar
ILO	International Labour Organization
I-O	<i>Input-Output</i>
KCD	Kepala Cabang Dinas

Daftar Singkatan dan Akronim

KPBC	Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
KSK	Koordinator Statistik Kecamatan
LTAB	Luas Tanaman Akhir Bulan
Migas	Minyak dan gas
Nonmigas	Non minyak dan gas
NTB	Nilai Tambah Bruto
PBB	Perserikatan Bangsa-bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PEB	Pemberitahuan Ekspor Barang
PIB	Pemberitahuan Impor Barang
PNB	Produk Nasional Bruto
PPL	Penyuluh Pertanian Lapangan
PPLS	Pendataan Program Perlindungan Sosial
ppp	<i>purchasing power parity</i>
pps	<i>proportional probability to size</i>
PSE05	Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005
q to q	<i>quarter to quarter</i>
RTS	Rumah Tangga Sasaran
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SBH	Survei Biaya Hidup
SD	Sekolah Dasar
SITC	<i>System of International Trade Classification</i>
SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SNA	<i>System of National Accounts</i>
SP	Sensus Penduduk
SPKKD	Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar
SR	<i>Subround</i>
Supas	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UNDP	United Nation Development Program
UNSD	<i>United Nations Statistical Division</i>
WCO	World Customs Organization
y on y	<i>year on year</i>